

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA  
DAN TINGKAT KEMISKINAN DI  
KALIMANTAN TENGAH**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Manajemen**

**Disusun Oleh :**

**MARIA WAHYU UTAMI**

**NIM. 500645132**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS TERBUKA**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul "**Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Tengah** " adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.  
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, Mei 2016

Yang menyatakan,



Maria Wahyu Utami  
NIM. 500645132

**ABSTRACT****EFFECT OF INFLATION AND ECONOMIC GROWTH TO OPEN  
UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN CENTRAL KALIMANTAN**

Maria Wahyu Utami  
[mariawahyuu@gmail.com](mailto:mariawahyuu@gmail.com)  
Universitas Terbuka

**Keywords :** inflation, economic growth, unemployment, poverty, path analysis.

This study aims to determine the effect of inflation and economic growth on unemployment rate and poverty rate in Central Kalimantan. This research needs to be done so that the program to control inflation and encourage economic growth can effectively suppress unemployment and poverty. The research used is quantitative research using secondary data available in Central Bureau of Statistics of Central Kalimantan Province and Regional Development Planning Board of Central Kalimantan Province. The data analyzed are data from 2004 to 2015 and other sources ie journals and research results. Data analysis was done by Multiple Linear Regression Method and Path Analysis Method. From the analysis, it can be concluded that inflation, economic growth and unemployment rate have an effect on poverty rate in Central Kalimantan. These three variables explain 83.7 percent of the changes occurring in poverty rates in Central Kalimantan. The most influential variable of poverty rate in Central Kalimantan is the unemployment rate with a coefficient of 0.632 which means an increase of 1 percent unemployment will increase 0.632 percent of poverty rate in Central Kalimantan. While economic growth negatively affects the unemployment rate in Central Kalimantan with a coefficient of -0.699 percent, which means an increase in economic growth of 1 percent will reduce the unemployment rate by 0.699 percent.

**ABSTRAK****PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN TINGKAT  
KEMISKINAN DI KALIMANTAN TENGAH**

Maria Wahyu Utami  
[mariawahyuu@gmail.com](mailto:mariawahyuu@gmail.com)  
Universitas Terbuka

**Kata Kunci :** inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, analisis jalur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Penelitian ini perlu dilakukan agar program untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dapat efektif menekan pengangguran dan kemiskinan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder yang tersedia di Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Data yang dianalisis adalah data tahun 2004 sampai dengan 2015 dan sumber-sumber lain yaitu jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan Metode Regresi Linier Berganda dan Metode Analisis Jalur. Dari hasil analisis diambil kesimpulan bahwa inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Ketiga variabel ini menjelaskan 83,7 persen terhadap perubahan yang terjadi pada tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah adalah tingkat pengangguran dengan koefisien 0,632 yang berarti peningkatan 1 persen pengangguran akan meningkatkan 0,632 persen tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Tengah dengan koefisien -0,699 persen, yang berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan mengurangi tingkat pengangguran sebesar 0,699 persen.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER  
(TAPM)**

Judul TAPM : **Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Tengah**

Penyusun TAPM : Maria Wahyu Utami  
NIM : 500645132  
Program Studi : Magister Manajemen

Menyetujui :

Pembimbing II,

  
Dr. Dodi Sukmayadi, M.Sc. Ed  
NIP. 19610727 198703 1 002

Pembimbing I,

  
Dr. Usup Riasty Christa, M.M  
NIP. 19580519 198803 2 002

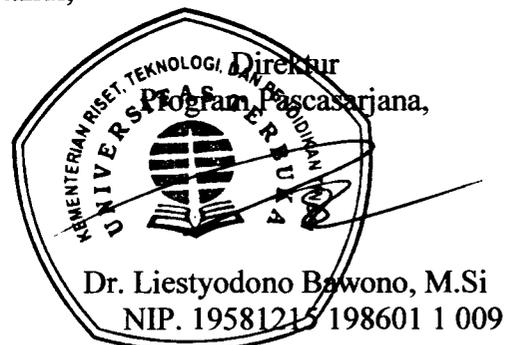
Penguji Ahli,

  
Dr. Mahjus Ekananda Sitompul, M.M., M.S.E

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana  
Ekonomi dan Bisnis,

  
Rini Yayuk Priyati, S.E, M.Ec., Ph.D  
NIP. 19761012 200112 2 002

  
Direktur  
Program Pascasarjana,  
Dr. Liestyodono Bowono, M.Si  
NIP. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN**

**PENGESAHAN**

Nama : Maria Wahyu Utami  
NIM : 500645132  
Program Studi : Magister Manajemen  
Judul TAPM : **Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi  
Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan  
Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Tengah**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Minggu, 26 Juni 2016  
Waktu : 08.00-09.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

**Panitia Penguji TAPM**

Ketua Komisi Penguji :

Dra. Johanna B.S. Pantow, M.App.L



Penguji Ahli :

Dr. Mahjus Ekananda Sitompul, M.M., M.S.E



Pembimbing I :

Dr. Usup Riassy Christa, M.M



Pembimbing II :

Dr. Dodi Sukmayadi, M.Sc. Ed



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Yang Maha Kasih karena atas berkat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) atau tesis yang berjudul **“Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Tengah”** ini.

Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Magister Manajemen Bidang Minat Keuangan Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari, banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang diberikan kepada saya, sehingga penulisan TAPM ini dapat saya selesaikan dengan baik. Untuk itu, saya menghaturkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini, antara lain :

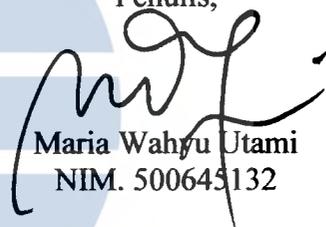
1. Rektor Universitas Terbuka, Bapak Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta, Bapak Dr.Liestyodono Bawono Irianto, M.Si
3. Kepala UPT-Universitas Terbuka UPBJJ Palangka Raya, Bapak Drs.Haholongan Simanjuntak, M.Pd beserta rekan-rekan UT-UPBJJ Palangka Raya
4. Dosen pembimbing I, Ibu Dr. Usup Riassy Christa, M.M
5. Dosen pembimbing II, Bapak Dr. Dodi Sukmayadi, M.Sc. Ed
6. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Hanif Yahya, S.Si, M.Si beserta rekan-rekan di BPS Provinsi Kalimantan Tengah

7. Suami tercinta Aris Kusnandar dan anak-anak terkasih Yehezkiel Purnomo Aji dan Jacobian Tansah Setyo
8. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini yang telah memberikan bantuan sehingga TAPM ini dapat saya selesaikan.

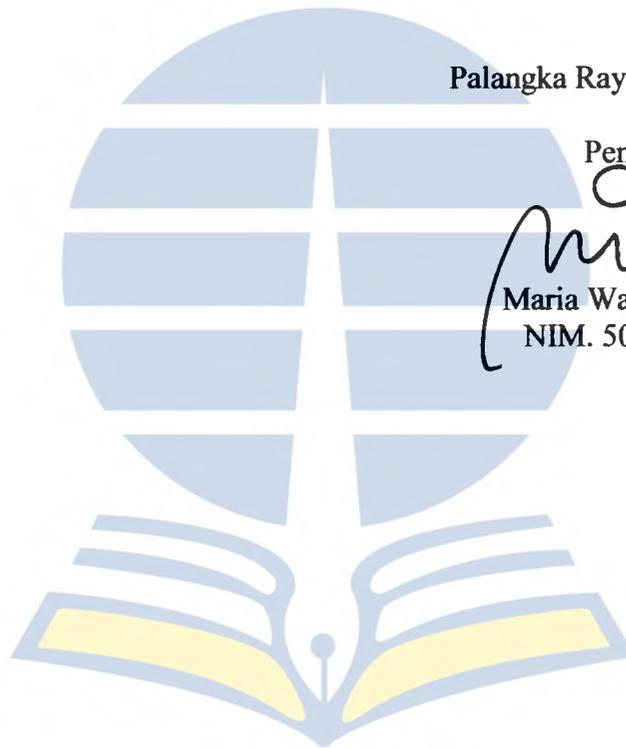
Akhir kata semoga TAPM ini membawa manfaat bagi penulis dan bagi pihak-pihak yang terkait untuk pengembangan kebijakan maupun ilmu pengetahuan.

Palangka Raya, 16 Mei 2016

Penulis,



Maria Wahyu Utami  
NIM. 500645132



**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>ABSTRACT</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	13
1. Inflasi .....	13
2. Penghitungan Inflasi di Indonesia.....	21
3. Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi.....	22
4. Pengangguran .....	29
5. Kemiskinan .....	34
6. Hubungan antara Inflasi dan Pengangguran .....	39
7. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran .....	41
8. Hubungan antara Inflasi dan Kemiskinan .....	42
9. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan .....	42
10. Hubungan antara Pengangguran dan Kemiskinan .....	43
11. Peran Dunia Usaha dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Indonesia .....	44
B. Hasil Penelitian Sebelumnya .....	49
C. Kerangka Konseptual .....	51
D. Hipotesis Penelitian .....	52

<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	53
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	53
C. Metode Pengumpulan Data .....	60
D. Metode Analisis Data .....	61
E. Pengujian Hipotesis .....	65
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Obyek Penelitian .....	70
1. Inflasi Kalimantan Tengah .....	70
2. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah .....	71
3. Pengendalian Inflasi dan Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah .....	78
4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Tengah .....	79
5. Tingkat Kemiskinan Kalimantan Tengah .....	82
B. Hasil Pengolahan Data .....	83
1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .....	83
2. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	85
3. Hasil Uji Statistik .....	88
4. Penghitungan Dampak Dengan Analisis Jalur .....	91
5. Disagregasi Variabel Bebas .....	92
C. Pembahasan .....	94
1. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka .....	94
2. Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan .....	95
3. Pengaruh Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kelompok Sektor dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan .....	97
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>
Lampiran 1. Tabulasi Data Mentah .....	104
Lampiran 2. Hasil Output SPSS .....	105

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Target Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015 .....	7
Tabel 4.1 Inflasi dan Andil Inflasi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016 .....	65
Tabel 4.2 Kontribusi dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah Tahun 2016 (Persen)	74
Tabel 4.3 Kontribusi dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah Menurut Sektor Tahun 2003 – 2016 (Persen) .....	76
Tabel 4.4 Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 – 2016 .....	80
Tabel 4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2012 – 2015	81
Tabel 4.6 Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Tahun 2011 – 2014	83
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	85
Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas .....	87
Tabel 4.9 Uji Autokorelasi .....	87
Tabel 4.10 Hasil Uji F .....	90
Tabel 4.11 Hasil Uji t .....	90
Tabel 4.12 Analisis Jalur Variabel Inflasi (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2), terhadap Pengangguran (Y1) dan Dampaknya terhadap Kemiskinan (Y2) .....	91
Tabel 4.13 Hasil Uji t Data Didisagregasi .....	93

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1.1 Target dan Realisasi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015 .....	8
Gambar 1.2 Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015	10
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	51
Gambar 3.1 Diagram Jalur Hubungan Kausal Inflasi (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), Pengangguran (Y1) dan Kemiskinan (Y2) .....	64
Gambar 4.1 Inflasi Kalimantan Tengah 2003 – 2016 (Persen) .....	70
Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2003 – 2016 (Persen) .....	72
Gambar 4.3 Struktur Perekonomian Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Sektor Tahun 2003 – 2016 (Persen) .....	75
Gambar 4.4 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 (Persen) .....	77
Gambar 4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Tengah Tahun 2003 – 2016 (Persen) .....	79
Gambar 4.6 Tingkat Kemiskinan Kalimantan Tengah Tahun 2003 – 2016 (Persen) .....	82
Gambar 4.7 Inflasi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2003 – 2016 (Persen) .....	84
Gambar 4.8 Uji Normalitas Data .....	86
Gambar 4.9 Uji Heterokedastisitas .....	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Pembangunan merupakan rangkaian upaya dan proses perbaikan yang terencana, terpadu, bertahap, dan berkesinambungan dalam berbagai bidang. Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal. Pembangunan tersebut dilaksanakan dalam skala nasional maupun regional. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Secara awam, dapat dikatakan bahwa diperlukan pendapatan yang tinggi untuk dapat mencapai kesejahteraan atau meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat. Ada *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (Todaro, 2000). Pembangunan yang berorientasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, cenderung pemerataannya rendah. Sementara jika pembangunan lebih berorientasi untuk mencapai pemerataan, maka pertumbuhan akan cenderung rendah.

Bangsa Indonesia mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dan terdiri dari tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat agregat-nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai nasional; dan tingkat global/internasional pembangunan antar negara/bangsa.

Penyusunan program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, otonomi, demokrasi dan dituangkan dalam prinsip sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah pembangunan yang memanusiakan manusia. Prinsip demikian diarahkan pada upaya mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia. Tujuan pembangunan manusia adalah meningkatkan dan memperkuat visi pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan daya saing manusia Indonesia.
2. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang memberikan peluang yang sama kepada setiap manusia untuk memperoleh akses ekonomi. Prinsip demikian diarahkan pada upaya membangun penguatan sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh setiap manusia. Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan efisiensi sumberdaya ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

3. Pembangunan prasarana. Pembangunan prasarana adalah pembangunan yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendukung pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Prinsip demikian diarahkan pada upaya memicu dan memacu dukungan bagi pelaksanaan pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan prasarana adalah menyediakan bantuan basis pendukung bagi pelaksanaan pembangunan manusia dan ekonomi.
4. Pembangunan kelembagaan. Pembangunan kelembagaan adalah pembangunan yang memperkuat mekanisme pembangunan yang telah berjalan di masyarakat. Prinsip demikian diarahkan pada upaya pelaksanaan otonomi pembangunan yang nyata di masyarakat. Tujuan pembangunan kelembagaan adalah melembagakan proses pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat melalui lembaga pembangunan pemerintah dan lembaga pembangunan milik masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah merupakan proses pengelolaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Untuk memaksimalkan proses pembangunan daerah yang didukung oleh kebijakan pembangunan berdasarkan kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya alam, maka diperlukan alat ukur yang dapat menginformasikan tentang kekhasan daerah tersebut. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah seperti meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk penduduk, maka pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Kedua subjek pembangunan tersebut memiliki kedudukan yang sama untuk

berinisiatif dalam program-program pembangunan yang memberi dampak positif bagi daerah.

Ada berbagai macam teori pembangunan ekonomi daerah yang jika diintegrasikan secara komprehensif dapat membantu dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Teori-teori seperti teori ekonomi neo klasik, teori basis ekonomi, teori lokasi, teori tempat sentral, teori kausasi kumulatif dan teori daya tarik merupakan beberapa teori yang dikemukakan para pakar pembangunan ekonomi regional. Pada dasarnya teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah berwenang atau pengambil keputusan publik guna mewujudkan suatu kondisi pembangunan atau masyarakat yang diinginkan, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi, permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan juga tidak sama. Disamping itu, antara suatu daerah dengan daerah lainnya terdapat kaitan sosial ekonomi sehingga kondisi dan perkembangan suatu daerah tertentu akan mempengaruhi pula kondisi dan pembangunan daerah terkait. Karena itu, kebijakan pada tingkat

nasional yang diberlakukan secara umum pada seluruh wilayah tidak akan sesuai untuk memecahkan masalah pembangunan pada masing-masing daerah. Untuk dapat memaksimalkan proses pembangunan daerah, maka kebijakan pembangunan regional perlu diterapkan untuk masing-masing daerah.

Kemajuan pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu diukur dengan beberapa indikator. Indikator pembangunan tersebut mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan ilmu ekonomi pembangunan dan ketersediaan data pendukungnya. Beberapa indikator pembangunan yang ditetapkan di Indonesia diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, gini rasio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan beberapa target indikator kinerja daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja daerah ditetapkan sebagai salah satu ukuran pencapaian pembangunan. Pencapaian target indikator kinerja daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator kinerja tersebut adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya mengendalikan inflasi dan memacu pertumbuhan ekonomi dengan harapan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan, melalui berbagai program kebijakan.

Inflasi perlu dikendalikan, karena inflasi bisa berdampak positif dan negatif, tergantung dari besaran inflasi yang terjadi. Inflasi rendah berpengaruh positif dan mampu mendorong perekonomian, meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong investasi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi dapat melemahkan perekonomian, menambah biaya produksi, mengurangi tingkat

investasi dan menurunkan daya beli para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh. Inflasi dapat menguntungkan produsen bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi dan merugikan produsen, maka produsen bisa menghentikan produksinya.

Inflasi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena inflasi mempengaruhi harga kebutuhan masyarakat. Inflasi yang terjadi saat pendapatan masyarakat tetap atau bahkan menurun, akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Bagi dunia usaha, inflasi menyebabkan meningkatnya biaya produksi sehingga mengurangi pendapatan. Untuk itu inflasi harus dikendalikan ke level yang sehat pada level 3 – 5 persen (Sukirno, 2004).

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan mengurangi pengangguran. Pertumbuhan ekonomi juga dapat berdampak negatif. Kerusakan lingkungan, semakin berkurangnya sumber daya alam dan terjadinya kesenjangan pendapatan masyarakat adalah beberapa dampak negatif yang dapat terjadi dalam suatu kegiatan perekonomian. Pengembangan kegiatan perekonomian dan memperluas kesempatan kerja serta menekan jumlah penduduk miskin terus diupayakan

melalui berbagai program pembangunan. Keberhasilan berbagai program pembangunan pemerintah tersebut perlu didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 menetapkan beberapa target indikator kinerja daerah tahun 2011 – 2015 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1  
Target Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja Daerah	Target (%)				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Inflasi	6,0	5,0	4,0	3,0	2,5
2	Pertumbuhan Ekonomi	6,7	6,9	7,1	7,3	7,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,5	3,0	2,75	2,5	2,0
4	Kemiskinan	4,5	3,5	3,0	2,5	2,0

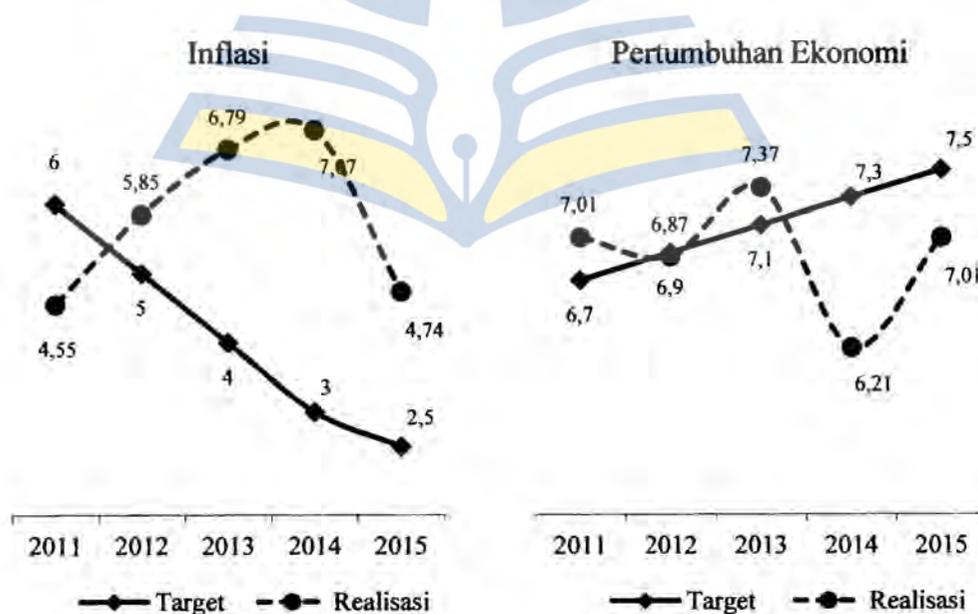
Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Upaya mengembangkan kegiatan perekonomian, memperluas kesempatan kerja dan menekan jumlah penduduk miskin tidak selalu

dapat mewujudkan hasil yang diharapkan. Keberhasilan program pembangunan pemerintah perlu didukung oleh masyarakat dan dunia usaha. Meskipun berbagai upaya dan program kebijakan telah dilakukan namun realisasi target tersebut belum sepenuhnya dapat dicapai. Monitoring dan evaluasi program kebijakan terus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas program kebijakan tersebut.

Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 menunjukkan target dan realisasi indikator kinerja daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan kemiskinan tahun 2011 - 2015. Kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa tidak semua target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Gambar 1.1  
Target dan Realisasi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah  
Tahun 2011 – 2015 (%)

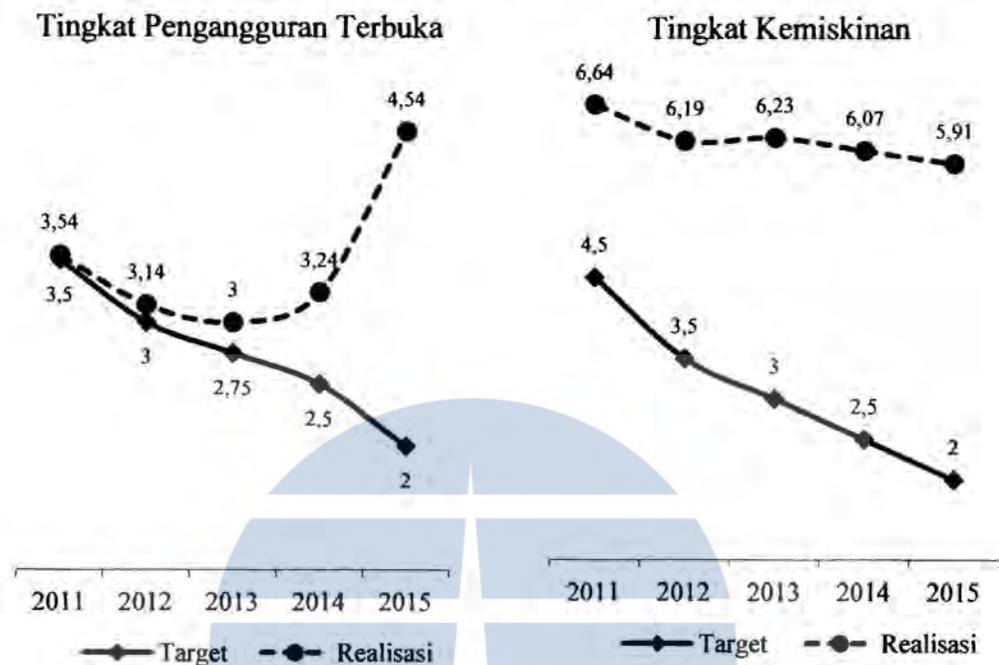


Inflasi Kalimantan Tengah dapat dikendalikan pada tahun 2011. Inflasi tahun 2011 sebesar 4,55 persen dibawah target yang ditetapkan yaitu enam persen. Namun, pada tahun 2012 – 2015 inflasi di Kalimantan Tengah lebih tinggi dari yang ditargetkan. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan laju inflasi. Pembentukan pasar penyeimbang, penjualan barang kebutuhan masyarakat dengan harga murah, pemenuhan dan penyediaan komoditas penyumbang inflasi, adalah beberapa upaya yang terus dilakukan untuk menekan laju inflasi.

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi berhasil dicapai hanya pada tahun 2011 dan 2013, sedangkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2012, 2014 dan 2015 tidak dapat dicapai. Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2012, 2014 dan 2015 lebih rendah dari yang ditargetkan. Sektor-sektor ekonomi unggulan terus dikembangkan agar selalu tumbuh. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi diharapkan dapat menekan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Hal yang sama juga terjadi pada pencapaian target pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan tahun 2015 sebesar dua persen. Target tersebut tidak dapat dicapai selama tahun 2011 – 2015. Tingkat pengangguran tahun 2015 sebesar 4,54 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 5,91 persen. Diperlukan upaya dan program kebijakan yang lebih komprehensif dalam penyediaan lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran dapat diturunkan yang pada akhirnya akan berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan.

Gambar 1.2  
Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan  
Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015 (%)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target indikator kinerja daerah. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Koordinasi Pengawasan Pertumbuhan Ekonomi (TKP2E) dibentuk agar dapat mengendalikan inflasi dan mengawal pertumbuhan ekonomi sehingga target kedua indikator dapat dicapai. Tim ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan terkait pengendalian inflasi dan perekonomian. Diharapkan dengan tercapainya dua indikator tersebut, maka pengangguran dan kemiskinan juga dapat ditekan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah dibuat agar program

kegiatan TPID dan TKP2E berjalan efektif. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran dapat diturunkan. Harapan ini dapat terwujud jika terdapat hubungan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan sehingga perlu dilakukan kajian dan penelitian terkait hal tersebut.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran?
2. Apakah inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan?
3. Apakah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran.
2. Menganalisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan.
3. Menganalisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat akademis bagi program Magister Manajemen Universitas Terbuka untuk melengkapi ragam penelitian yang dibuat mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.
2. Manfaat praktis bagi penulis merupakan usaha meningkatkan kemampuan berfikir dan menerapkan teori-teori yang penulis peroleh dan sekaligus diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama masa studi di Magister Manajemen Universitas Terbuka.
3. Manfaat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semoga dapat memberi masukan bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan menekan tingkat kemiskinan terutama di Kalimantan Tengah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolute*) yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Definisi ini mensyaratkan tiga kriteria yang perlu diamati untuk melihat telah terjadinya inflasi yaitu kenaikan harga, bersifat umum dan terjadi terus menerus dalam rentang waktu tertentu. Seirama dengan kenaikan harga-harga tersebut, maka nilai uang juga turun secara tajam sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut. Kenaikan harga-harga bukanlah semata karena pengaruh teknologi, sifat-sifat barang maupun karena pengaruh ketika menjelang hari raya, tetapi karena adanya pengaruh inflasi yang pada umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.

Inflasi yang berlangsung lama akan melumpuhkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menjadi semakin lesu karena industri dan produksi berada dalam kondisi stagnan. Kondisi ini disebut sebagai stagnasi, yaitu suatu keadaan dimana pertumbuhan ekonomi berlangsung lambat dan bahkan berhenti. Kemunduran ekonomi dan tidak adanya pertumbuhan ekonomi dalam pengertian riil merupakan akibat dari inflasi yang semakin parah. Gabungan antara pertumbuhan ekonomi yang lamban dan tingkat pengangguran yang terjadi bersamaan dengan inflasi menyebabkan terjadinya suatu keadaan yang disebut dengan stagflasi.

Dalam keadaan inflasi harga barang-barang dan jasa terus meningkat tajam. Sedangkan dalam keadaan deflasi, harga barang-barang dan jasa terus menurun dengan tajam. Deflasi adalah suatu keadaan ekonomi dimana harga barang-barang dan jasa mengalami penurunan dengan tujuan untuk menggalakan produksi, industri, kesempatan kerja, dan meningkatkan nilai uang. Inflasi dan deflasi yang tidak terkendali dapat mengancam dan merusak stabilitas perekonomian suatu negara.

Terdapat beberapa teori yang berkembang dalam menjelaskan penyebab timbulnya inflasi, yaitu:

a. Teori Kuantitas

Teori kuantitas menjelaskan bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (*demand*) sehingga uang beredar di masyarakat bertambah banyak. Teori ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inti dari teori ini adalah inflasi hanya bisa terjadi jika terdapat penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral, dan laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang.

Teori kuantitas membedakan sumber inflasi menjadi dua teori yaitu teori *Demand Pull Inflation* dan *Cost Push Inflation* (Sukirno, 2004). *Demand pull inflation* atau inflasi tarikan permintaan terjadi karena adanya kenaikan permintaan agregatif dimana kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh (*full employment*). Kondisi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian sedang berkembang pesat.

Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi sehingga daya beli sangat tinggi. Daya beli yang sangat tinggi mendorong permintaan melebihi total produk yang tersedia sehingga menimbulkan kenaikan harga secara umum. Kenaikan kesempatan agregatif selain dapat menaikkan harga-harga juga dapat meningkatkan produksi. Jika kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan tidak lagi mendorong kenaikan output (produksi) tetapi hanya mendorong kenaikan harga-harga.

Sedangkan *cost push inflation* atau inflasi desakan biaya terjadi jika biaya produksi mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan biaya produksi berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum termasuk harga barang baku dan penolong yang digunakan dalam proses produksi. Pada kondisi *cost push inflation*, tingkat penawaran lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat permintaan. Ini karena adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu.

#### b. Keynesian Model

Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barangbarang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi inflationary gap. Keterbatasan jumlah persediaan barang ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Oleh karenanya sama seperti

pandangan kaum moneteris, Keynesian model ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek.

Inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai sudut pandang sebagai berikut :

a. Asal inflasi. Menurut Sukirno (2004), berdasar asal terjadinya, maka inflasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Inflasi domestik (*domestic inflation*) adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestik). Kenaikan harga disebabkan karena adanya kejutan (*shock*) dari dalam negeri, baik karena perilaku masyarakat maupun perilaku pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan.
- 2) *Imported inflation* atau inflasi diimpor. Inflasi ini terjadi ketika harga barang-barang impor mengalami kenaikan harga apalagi jika barang-barang impor tersebut berperan penting dalam kegiatan produksi.

b. Intensitas inflasi. Menurut Khalwaty (2000), inflasi dapat dibedakan berdasarkan intensitasnya yaitu :

- 1) *Creeping inflation* atau *mild inflation* atau inflasi merayap adalah inflasi yang terjadi dengan laju pertumbuhan berlangsung lambat (merayap). Inflasi ini sering juga disebut dengan istilah inflasi sedang terjadi karena kenaikan harga-harga secara perlahan-lahan.
- 2) *Hyper inflation* atau *galloping inflation* adalah inflasi yang sangat berat yang timbul akibat adanya kenaikan harga-harga umum yang berlangsung sangat cepat. Inflasi ini sangat berbahaya karena dapat merusak struktur perekonomian negara.

c. Bobot inflasi. Murni (2013) membedakan inflasi berdasarkan besaran atau bobotnya menjadi 4 macam, yaitu :

- 1) Inflasi ringan atau *creeping inflation* yaitu inflasi dengan laju pertumbuhan yang berlangsung secara perlahan dan berada posisi satu digit atau dibawah 10 persen per tahun.
- 2) Inflasi sedang (moderat) adalah inflasi dengan tingkat laju pertumbuhan berada di antara 10 – 30 persen per tahun atau melebihi dua digit dan sangat mengancam struktur dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
- 3) Inflasi berat merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan di antara 30 – 100 persen per tahun. Kondisi ini menyebabkan sektor-sektor produksi hampir lumpuh total kecuali yang dimiliki negara.
- 4) Inflasi sangat berat atau *hyper inflation* adalah inflasi dengan laju pertumbuhan melampaui 100 persen per tahun.

Inflasi berdampak luas dan beraneka ragam serta menurunkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Laju pertumbuhan inflasi yang tinggi akan merusak struktur ekonomi dan melemahkan kinerja perekonomian suatu negara. Inflasi yang terus berlanjut apalagi jika sampai melebihi dua digit dapat berpengaruh pada distribusi pendapatan (*equity effect*) dan alokasi faktor produksi dan produk nasional (*efficiency effect*).

*Equity effect* adalah dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat berdampak pada tidak meratanya distribusi pendapatan, penurunan upah riil pada masyarakat berpendapatan tetap sehingga melemahkan daya beli serta penurunan nilai investasi riil. Sedangkan *efficiency effect* adalah dampak inflasi terhadap biaya produksi. Harga-harga faktor produksi akan terus meningkat karena adanya

inflasi sehingga dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Hal ini terjadi karena inflasi menyebabkan kenaikan biaya produksi. Inflasi yang tinggi jika tidak diikuti dengan peningkatan efisiensi terhadap biaya produksi akan meningkatkan harga-harga. Sedangkan di sisi lain daya beli masyarakat melemah sehingga harga produk semakin tidak kompetitif.

Untuk itu, laju pertumbuhan inflasi harus selalu diwaspadai dan dikendalikan karena :

- a. Inflasi berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan, sehingga perlu dicermati terutama oleh para pelaku ekonomi dan bisnis.
- b. Inflasi yang tinggi mempunyai pengaruh agregatif terhadap perekonomian makro sebagai faktor eksternal dunia usaha serta berdampak luas terhadap perekonomian mikro yang merupakan faktor internal dunia bisnis.
- c. Industri yang berorientasi ekspor akan semakin kurang kompetitif di pasar global dan pasar nasional karena faktor produksi yang mahal menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- d. Kemerosotan produksi baik yang berorientasi ekspor maupun pasaran domestik yang akan meningkatkan laju pertumbuhan angka pengangguran.
- e. Inflasi yang tinggi akan melemahkan daya beli masyarakat terutama terhadap produksi dalam negeri.
- f. Inflasi yang tinggi akan mendorong para pemodal nasional untuk menanamkan modalnya ke luar negeri dan bahkan para pengusaha akan merelokasikan industrinya ke luar negeri yang perekonomiannya lebih stabil.

Inflasi harus dihadapi dan terus diwaspadai karena dampaknya sangat luas dan kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Inflasi dapat meningkatkan kegiatan

ekonomi jika nilainya sekitar di bawah 5 persen. Inflasi yang lajunya relatif tetap dan dapat diprediksi bisa meningkatkan ekonomi (Mankiw, 2006). Inflasi yang terlalu rendah, apalagi hingga mendekati nol juga tidak memacu perekonomian karena akan menimbulkan stagnasi sehingga inflasi perlu dijaga dan dikendalikan. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneter.

Menurut Khalwaty (2000), secara umum terdapat empat macam cara atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mengendalikan laju inflasi hingga ke tingkat yang aman bagi kinerja perekonomian. Kebijakan tersebut terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan output dan kebijakan harga dan *indexing*.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan sasaran mengurangi penawaran uang atau jumlah uang yang beredar. Kebijakan tersebut misalnya menaikkan suku bunga atau memperbesar cadangan devisa. Kebijakan ini akan menimbulkan penurunan investasi dan menurunkan konsumsi dalam perekonomian masyarakat. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap uang akan menyebabkan munculnya inflatoar dan memicu laju pertumbuhan inflasi. Oleh sebab itu keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan kebutuhan terhadap uang di masyarakat harus selalu dipantau.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui kementerian ekonomi dan keuangan untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan memperkecil pengeluaran dan menaikkan pajak. Kebijakan fiskal dilakukan dengan cara mengatur pengeluaran pemerintah secara seimbang yaitu

pengeluaran disesuaikan dengan penerimaan sehingga tidak terjadi defisit pada anggaran belanja negara yang dapat menjadi sumber inflasi. Kebijakan fiskal akan berpengaruh terhadap permintaan agregat dan pengeluaran pemerintah sehingga melindungi anggaran negara dari defisit dan menjadi instrumen untuk menekan laju pertumbuhan inflasi.

Kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Tujuan penting kebijakan fiskal adalah mempertahankan kesempatan kerja penuh untuk mencegah terjadinya pengangguran. Kegagalan dalam menyediakan ruang kerja bagi masyarakat akan menimbulkan tidak tercapainya target pendapatan nasional dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang optimal. Disamping itu, bila pengangguran semakin besar, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat karena timbulnya gejolak sosial seperti tindakan kejahatan dan kriminal.

Berbagai kebijakan output dapat pula digunakan untuk mengendalikan laju inflasi. Apabila output meningkat, maka dampaknya akan menekan laju inflasi. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan output antara lain menurunkan tarif pajak, mengurangi berbagai pungutan yang berdampak pada ekonomi biaya tinggi, membebaskan atau menurunkan tarif bea masuk barang-barang impor, melakukan restrukturisasi ekonomi, debirokratisasi perijinan, deregulasi, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pertambahan jumlah output akan menekan harga menjadi lebih murah.

Kebijakan harga dan *indexing* juga dapat mengendalikan laju inflasi. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara menentukan harga dasar atau harga

patokan untuk produk-produk tertentu, dan penentuan tingkat upah berdasarkan indeks harga barang-barang kebutuhan minimum.

## 2. Penghitungan Inflasi di Indonesia

Pengukuran tingkat inflasi dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya angka harga umum, angka deflator produk nasional bruto, indeks harga konsumen, aras harga harapan, serta indeks harga dalam negeri dan luar negeri. Penghitungan inflasi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan eceran dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. IHK merupakan salah satu instrumen analisis dalam menentukan dasar kebijakan makro ekonomi, terutama sebagai deflator dalam penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dasar penyesuaian atau eskalasi gaji/upah tenaga kerja, besaran tarif pajak, dan beberapa regulasi pemerintah lainnya.

Manfaat Indeks Harga Konsumen (IHK) antara lain :

- a. Mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang dan jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.
- b. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau deflasi.
- c. Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*).
- d. Penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*).
- e. Eskalasi nilai proyek (*project escalation*).

- f. Penentuan target inflasi (*inflation targeting*).
- g. Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*budget indexation*).
- h. Sebagai pembagi PDB dan PDRB (*GDP Deflator*).
- i. Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*).
- j. Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

### 3. Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus yang mengakibatkan suatu perubahan perekonomian ke arah yang lebih baik di berbagai bidang dengan hasil akhir adalah peningkatan pendapatan perkapita. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang.

Hakim (2004; 62) menyatakan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong adanya pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar suatu proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian berbagai teori/model pembangunan ekonomi dan teori/model pertumbuhan ekonomi secara umum diartikan sama. Selanjutnya Hakim mengelompokkan berbagai teori/model tersebut berdasarkan sejarahnya yaitu mulai dari teori yang paling tua diikuti dengan yang lebih muda sampai pada teori terbaru. Teori/model pembangunan ekonomi tersebut yaitu :

- a. Teori Pembangunan Klasik. Beberapa teori pembangunan klasik yaitu :
  - 1) Teori Pertumbuhan Adam Smith, yang menyatakan bahwa ada dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan output total yang dapat diukur

dengan *Gross Domestic Product (GDP)*. Variabel penentu proses produksi adalah sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia dan stok barang kapital yang ada. Sedangkan peran pertumbuhan penduduk dalam pertumbuhan ekonomi menurut Smith sangat besar. Penduduk merupakan faktor yang penting dalam proses produksi sehingga ikut menentukan cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi.

- 2) Teori Pertumbuhan David Ricardo menitikberatkan pada distribusi pendapatan antar pelaku ekonomi dalam menjabarkan mekanisme pertumbuhan. Menurut David Ricardo, dalam masyarakat ekonomi terdapat tiga golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali hasil pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional lebih besar lagi. Sedangkan golongan buruh tergantung pada golongan kapitalis dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Sementara golongan tuan tanah hanya menerima sewa dari golongan kapitalis atas area tanah yang disewakannya.
- 3) Teori Pertumbuhan Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan sebuah perekonomian adalah kesejahteraan negara yang dinyatakan dengan meningkatnya *Gross National Product (GNP)* potensialnya. Salah satu cara meningkatkan GNP potensial suatu negara adalah dengan meningkatkan produksi sektor pertanian dan

industri. Produksi di kedua sektor tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi. Sementara faktor non ekonomi yaitu keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, kerja keras dan disiplin masyarakat serta sikap jujur.

b. Teori Materialisme Sejarah Marx, membuat lima tahapan perkembangan sebuah perekonomian yaitu :

- 1) Perekonomian komunal primitif, dengan ciri kepemilikan bersama oleh seluruh masyarakat atas alat-alat produksi yang masih sederhana dengan produktivitas rendah.
- 2) Perekonomian perbudakan, muncul dengan ditemukannya alat-alat produksi yang lebih bagus sehingga hubungan produksi menjadi berubah. Orang yang tidak memiliki alat produksi bekerja sebagai budak bagi orang yang memiliki alat produksi. Kaum pemilik alat produksi mendapatkan keuntungan besar karena budak diberi imbalan yang sangat murah.
- 3) Perekonomian feodal, muncul karena berhasilnya pemberontakan kaum budak meskipun mereka belum bisa langsung menyejajarkan diri mereka dalam status sosial dengan bekas majkannya.
- 4) Perekonomian kapitalis, bermula ketika kaum buruh hanya bisa hidup pas-pasan, tergantung pada kaum kapitalis, sementara kaum kapitalis menumpuk-numpuk keuntungan dan diwujudkan dalam kapital untuk diinvestasikan kembali.

- 5) Perekonomian sosialis, dicirikan oleh kepemilikan bersama atas alat-alat produksi (mirip dengan perekonomian komunal primitif), tetapi alat-alat produksi merupakan hasil kebudayaan modern, hubungan ekonomi bukan lagi hubungan persaingan, tetapi kerja sama antar pelaku ekonomi.
- c. Model Pertumbuhan Neo Keynes : Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar. Model ini mencermati pengaruh investasi dan pertumbuhan kapasitas produksi terhadap peningkatan permintaan agregat yang akan menggerakkan roda perekonomian dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Model Pertumbuhan W.W Rostow, yang membagi proses pembangunan menjadi lima tahap yaitu masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, menuju ke kedewasaan dan era konsumsi masal tinggi. Kriteria yang digunakan untuk membedakan tahap satu dengan yang lain adalah perubahan yang terjadi dalam kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya dalam sebuah perekonomian.
- e. Pendekatan Neo-Klasik : Arthur Lewis. Model ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena membesarnya sektor industri yang terus mengumpulkan kapital, berdampingan dengan sektor pertanian yang hampir tidak mengumpulkan kapital sama sekali.
- f. Teori Pertumbuhan Neoklasik : Robert M. Solow dan James E. Meade. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input yaitu modal dan tenaga kerja dikombinasikan sedangkan faktor teknologi dianggap konstan (tidak berubah), sehingga tinggi rendahnya output tergantung pada cara mengkombinasikan modal dan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi

merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif, untuk itu penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

Dari berbagai teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tersebut maka dapat disimpulkan empat komponen utama pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal, kemajuan teknologi, pertumbuhan penduduk, dan sumber daya alam. Pengelolaan dan pengkombinasian yang tepat antara keempat komponen tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat meningkat jika pertumbuhan output atau Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil perkapita melebihi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi kesempatan kerja masyarakat. Meningkatnya PDB/PDRB riil berarti meningkatkan penggunaan faktor produksi termasuk tenaga kerja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan ditentukan oleh ketersediaan dan pemanfaatan faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi. Faktor produksi tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal serta teknologi dan inovasi. Sumber daya manusia sebagai input tenaga kerja terdiri kuantitas tenaga kerja dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonom meyakini bahwa kualitas input tenaga kerja yaitu keterampilan, pengetahuan dan disiplin merupakan unsur paling penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan teknologi dalam kegiatan perekonomian menuntut ketersediaan tenaga kerja terlatih dan terampil. Sumber daya alam atau kekayaan alam dapat mempermudah usaha mengembangkan perekonomian suatu negara terutama pada permulaan proses pertumbuhan ekonomi. Pada negara berkembang peranan sektor primer seperti pertanian dan pertambangan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Sumber daya modal atau barang modal juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang tumbuh pesat cenderung melakukan investasi sangat besar dalam pembentukan barang modal baru. Kemajuan teknologi dan inovasi juga menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi. Teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi, membantu dalam menemukan barang atau jasa baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya dan meningkatkan kualitas barang atau jasa tanpa meningkatkan harganya.

Selain faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat juga berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Sistem sosial, adat istiadat dan tradisi bisa saja menghambat masyarakat untuk menggunakan cara berproduksi yang modern. Sikap hemat masyarakat, sikap menghargai kerja keras dalam kegiatan ekonomi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Berbagai kebijakan dapat dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Cara mudah yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan bunga tabungan dan investasi nasional melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kenaikan bunga tabungan akan menarik minat masyarakat untuk meningkatkan tabungan.

Sedangkan kebijakan menurunkan pajak, misalnya, akan meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan tabungan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara.

Menurut Sukirno (2004) kebijakan yang dapat dijalankan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi yaitu kebijakan dalam modernisasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada atau transformasi kegiatan ekonomi dari yang bersifat tradisional kepada kegiatan yang modern.
- b. Mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, kawasan industri, irigasi, dan penyediaan jaringan listrik maupun telepon. Infrastruktur tersebut diperlukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasinya.
- c. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat akan meningkatkan kualitas tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi dalam kegiatan ekonomi.
- d. Mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan misalnya peraturan bidang pendidikan, subsidi untuk petani pengembang produk pertanian atau institusi dalam mengembangkan investasi.
- e. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi dalam rangka menentukan tujuan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan strategi dalam melaksanakan perencanaan ekonomi tersebut.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara atau wilayah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga

berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB/PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDB/PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB/PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB/PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

#### **4. Pengangguran**

Jumlah angkatan kerja yang ikut dalam proses produksi mempengaruhi pertumbuhan pendapatan nasional. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja terkait erat dengan pertumbuhan penduduk dan bisa berdampak positif maupun berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada negara berkembang dengan jumlah kapital terbatas dengan jumlah penduduk yang berlimpah, maka pertumbuhan penduduk justru bisa berdampak buruk terhadap perekonomian. Pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Terlebih lagi, pada negara berkembang, kebanyakan penduduk tinggal di wilayah pedesaan dengan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Karena jumlah tanah relatif tetap maka pertumbuhan penduduk justru akan memunculkan pengangguran dan mengurangi produktivitas.

Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan berbagai dampak negatif dan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Dampak negatif pengangguran terhadap perekonomian diantaranya :

- a. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena masyarakat kehilangan pekerjaan.
- b. Menurunnya pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat melemah dan berimbas pada kelesuan bisnis dan investasi.
- c. Menurunnya penerimaan pajak pemerintah.
- d. Pencapaian PDB/PDRB lebih rendah dari yang seharusnya dapat dicapai karena faktor produksi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dampak negatif pengangguran terhadap stabilitas sosial dan politik antara lain dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dalam masyarakat seperti kriminalitas atau kejahatan penipuan, pencurian, dan perampokan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah terkait tingginya tingkat pengangguran juga dapat mengganggu stabilitas politik.

Pengukuran tingkat pengangguran bukan sebuah pekerjaan mudah terutama terkait konsep yang digunakan untuk mendefinisikan pengangguran dan ketersediaan data untuk mengukur tingkat pengangguran. Namun demikian, pengangguran dapat diamati melalui dua pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labor force approach*). Tingkat pengangguran dengan pendekatan ini dihitung berdasarkan persentase dari perbandingan jumlah orang yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja, dengan rumus :

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

- b. Pendekatan Pemanfaatan Tenaga Kerja (*Labor utilization approach*). Tingkat pengangguran dengan pendekatan ini dibedakan menjadi :
- 1) Pengangguran penuh atau pengangguran terbuka (*Unemployed* atau *open unemployment*) yaitu sejumlah orang yang benar-benar tidak bekerja sama sekali atau tidak dimanfaatkan sama sekali.
  - 2) Setengah menganggur (*underemployed* atau *disguised unemployment*) yaitu sejumlah orang yang bekerja belum dimanfaatkan secara penuh, biasanya jam kerjanya selama seminggu kurang dari 35 jam.

Berdasarkan sumber/penyebabnya, pengangguran dibedakan menjadi (Sukirno, 2004):

- a. Pengangguran normal atau friksional (*Frictional Unemployment*), yaitu pengangguran yang disebabkan adanya keinginan pekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau lebih sesuai. Pengangguran ini seringkali dianggap sebagai hal yang normal dan tidak dianggap sebagai masalah yang serius. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi tersebut dipandang sudah mencapai kesempatan kerja penuh.
- b. Pengangguran siklikal (*Cyclical Unemployment*) yaitu pengangguran yang timbul karena adanya fluktuasi/siklis dalam perkembangan bisnis atau menurunnya kondisi perekonomian. Menurunnya kondisi perekonomian bisa disebabkan karena pengaruh dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang berakibat pada pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan dan menimbulkan pengangguran.

- c. Pengangguran struktural (*Structural Unemployment*) yaitu pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur ekonomi. Dalam suatu perekonomian tidak seluruh sektor ekonomi mengalami kemajuan yang sama bahkan ada sektor yang justru mengalami penurunan. Penurunan pada sektor atau industri tersebut akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menimbulkan pengangguran.
- d. Pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Mesin-mesin industri, robot dan bahan-bahan kimia memudahkan dan mengambil alih berbagai kegiatan produksi yang dilakukan oleh manusia menjadi lebih mudah dan cepat.

Sedangkan menurut jenisnya, Sukirno menggolongkan pengangguran menjadi :

- a. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini terlihat secara nyata dan sepenuh waktu yang terjadi akibat pertambahan lowongan kerja lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja, kondisi perekonomian yang menurun, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja dan akibat kemunduran suatu sektor atau industri tertentu.
- b. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Pengangguran ini terutama terjadi di sektor pertanian dan sektor jasa.

- c. Pengangguran bermusim (*Seasonal Unemployment*) yaitu pengangguran yang dipengaruhi oleh perubahan musim, biasanya bersifat sementara dan terjadi dalam jangka pendek secara berulang. Pengangguran ini sering terjadi di sektor pertanian dan perikanan.
- d. Setengah menganggur yaitu penduduk yang belum optimal bekerja atau bekerja kurang dari jam kerja normal, biasanya 35 jam seminggu.

Pengangguran menunjukkan sumber daya yang belum termanfaatkan dengan optimal. Para penganggur memiliki potensi untuk berkontribusi dalam perekonomian namun belum melakukannya. Hakim (2004) menyatakan bahwa ada beberapa hal bisa dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu menghilangkan kebijakan yang tidak tepat seperti mendorong penggunaan proses produksi padat kapital, menghilangkan distorsi harga faktor produksi, menata sistem pendidikan agar sesuai dengan permintaan pasar, dan memacu pertumbuhan yang dapat meningkatkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

Tingkat pengangguran menunjukkan berapa banyak orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Secara spesifik, penganggur terbuka terdiri atas :

- a. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

- d. Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

## 5. Kemiskinan

*The World Bank* (2013) mendefinisikan kemiskinan sebagai “kurangnya kesejahteraan”. Kemiskinan dikaitkan dengan kepemilikan barang sehingga masyarakat miskin adalah mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi di bawah ambang minimal kategori sejahtera. Pandangan ini melihat kemiskinan dalam kaitannya dengan masalah keuangan.

Pendekatan lainnya berfokus pada kemampuan individu menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki kemampuan pokok, memiliki pendapatan atau pendidikan yang kurang memadai, memiliki kesehatan yang kurang baik atau tidak memiliki kebebasan politik. BPS (2015) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pandangan-pandangan terhadap konsep kemiskinan ini menyebabkan pengukuran kemiskinan menjadi bervariasi.

Pada dasarnya langkah-langkah untuk mengukur kemiskinan yaitu :

- a. Menentukan indikator kesejahteraan.
- b. Menetapkan standar minimal yang dapat diterima indikator tersebut untuk memisahkan antara masyarakat miskin dan masyarakat tidak miskin (garis kemiskinan).
- c. Membuat rangkuman statistik untuk menggabungkan informasi dari distribusi indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan garis kemiskinan.

Penyebab-penyebab utama, atau paling tidak berhubungan dengan kemiskinan antara lain :

- a. Karakteristik wilayah, mencakup kerentanan terhadap bencana alam, keterpencilan, kualitas pemerintahan serta hak milik dan pelaksanaannya.
- b. Karakteristik masyarakat, mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik) dan layanan (kesehatan, pendidikan), kedekatan dengan pasar dan hubungan sosial.
- c. Karakteristik rumah tangga dan individu seperti demografis (jumlah anggota rumah tangga, usia struktur, rasio ketergantungan, dan gender kepala keluarga), ekonomi (status pekerjaan, jam kerja dan harta benda yang dimiliki) serta sosial (status kesehatan dan nutrisi, pendidikan dan tempat tinggal).

Berdasarkan penyebabnya kemiskinan terbagi menjadi dua macam yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu. Seringkali adat istiadat dan budaya suatu daerah membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil. Keadaan seperti ini menyebabkan mereka tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan.

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal. Kemiskinan relatif terjadi akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Ukuran kemiskinan relatif menjadi sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.

Sedangkan standar penilaian kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, laju pertumbuhan penduduk, kesenjangan pendapatan dan bencana alam.

Kebijakan yang disarankan untuk mengurangi kemiskinan antara lain pemberian kapital kepada penduduk miskin melalui berbagai kredit usaha,

meningkatkan pendidikan dan keterampilan penduduk, memperluas kesempatan kerja, memperbaiki kondisi kesehatan dan nutrisi penduduk, meningkatkan dan memanfaatkan hasil riset dan teknologi, dan program yang terintegrasi untuk menanggulangi kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Indikator kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu jumlah penduduk miskin, *Head Count Index* ( $P_0$ ) atau Tingkat Kemiskinan, *Poverty Gap Index* ( $P_1$ ) atau Indeks Kedalaman Kemiskinan, *Poverty Severity Index* ( $P_2$ ) atau Indeks Keparahan Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan. *Head*

*Count Index* ( $P_0$ ) atau Tingkat Kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. *Headcount Index* secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

*Poverty Gap Index* ( $P_1$ ) atau Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

*Poverty Severity Index* ( $P_2$ ) atau Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sedangkan Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

## 6. Hubungan antara Inflasi dan Pengangguran

Inflasi yang tinggi akan mendorong produsen melakukan efisiensi terhadap industrinya, seperti merasionalisasi tenaga kerja dan restrukturisasi atau melakukan perampingan organisasi yang menyebabkan timbulnya pengangguran. Penawaran tenaga kerja semakin meningkat sedangkan permintaan tenaga kerja berkurang. Tenaga kerja yang menganggur atau terkena pemutusan hubungan kerja terpaksa harus menerima upah atau gaji yang rendah.

Hubungan antara inflasi dan pengangguran diteliti oleh A.W. Phillips ekonom kelahiran New Zealand. Studi yang dilakukan A.W Phillips mengenai hubungan antara kenaikan tingkat upah dan tingkat pengangguran pada para pekerja di Inggris tahun 1861 – 1957 membuktikan adanya hubungan negatif antara kenaikan tingkat upah dan tingkat pengangguran. Hubungan negatif tersebut dibuktikan dengan kenaikan tingkat upah yang tinggi mengakibatkan menurunnya tingkat pengangguran. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan menurunnya tingkat upah. Hubungan tersebut tergambar sebagai suatu kurva yang disebut sebagai Kurva Phillips.

Kurva Phillips menyatakan bahwa tingkat inflasi tergantung pada tiga kekuatan yaitu inflasi yang diharapkan, deviasi pengangguran dari tingkat alamiah atau pengangguran siklis dan guncangan penawaran. Mankiw (2006: 379) lebih lanjut menjelaskan bahwa pengangguran siklis memberikan tekanan ke atas dan ke bawah pada inflasi. Pengangguran yang rendah akan menarik inflasi ke atas

atau inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) karena meningkatnya permintaan agregat akan meningkatkan harga barang dan jasa. Pengangguran yang tinggi akan menarik inflasi ke bawah.

Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja tidak mungkin terjadi secara bersamaan karena harus ada *trade off*. Jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, maka konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Pada awal analisis kurva Phillips menunjukkan bahwa terdapat *trade off* antara inflasi dan pengangguran, yaitu kenaikan tingkat inflasi akan diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Namun, selama periode tertentu kenaikan tingkat inflasi akan diikuti oleh kenaikan tingkat pengangguran. Sehingga, hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran cenderung bergeser dalam jangka panjang.

Pergeseran kurva Phillips disebabkan dua faktor yaitu :

- a. Demografi. Pada tingkat inflasi tertentu, yang apabila diikuti dengan kenaikan tingkat pengangguran yang lebih tinggi, maka kurva Phillips bergeser sepanjang komposisi perubahan angkatan kerja atau tingkat pengangguran tersebut. Pergeseran tersebut terjadi akibat penambahan angkatan kerja yang tidak terserap pasar tenaga kerja.
- b. Keseimbangan pasar tenaga kerja. Dalam kondisi keseimbangan pasar tenaga kerja, secara alamiah selalu terdapat pengangguran alamiah yang ditunjukkan dengan adanya titik perpotongan antara kurva Phillips dan sumbu horizontal.

Teori inflasi modern berpijak pada konsep NAIRU atau *Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment*, yaitu tingkat pengangguran terendah yang dapat dinikmati tanpa resiko kenaikan inflasi. Hal ini berarti tingkat pengangguran dan

produk pasar berada dalam keseimbangan inflasi. Apabila pembuat kebijakan bermaksud menjaga pengangguran di bawah NAIRU maka inflasi akan cenderung naik. Kurva Phillips menjadi salah satu alat untuk menentukan kebijakan ekonomi makro terkait inflasi dan pengangguran dengan tujuan menciptakan stabilitas harga dan menciptakan kesempatan kerja dalam waktu yang bersamaan.

## 7. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Hubungan negatif antara pengangguran dan PDB pertama kali dipelajari oleh ekonom Arthur M. Okun. Hukum Okun menyatakan hubungan negatif tersebut dalam rumus (Mankiw, 2006 ; 250) :

Perubahan persentase PDB riil = 3,5% - 2 x perubahan pada tingkat pengangguran

Jika tingkat pengangguran tetap maka PDB riil tumbuh sebesar 3,5 persen, pertumbuhan normal produksi barang dan jasa disebabkan pertumbuhan tenaga kerja, akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Setiap persentase tingkat kenaikan pengangguran, pertumbuhan PDB riil biasa turun dua persen.

Hukum Okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang membentuk siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebagaimana hubungan antara inflasi dan pengangguran, hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran akan berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perbedaan penting antara jangka panjang dan jangka pendek adalah bahwa harga fleksibel dalam jangka panjang namun kaku dalam jangka pendek. Perbedaan sifat harga tersebut digunakan dalam model penawaran agregat dan permintaan agregat sebagai

kerangka kerja untuk menganalisis fluktuasi ekonomi dan melihat bagaimana dampak kebijakan bervariasi selama horison waktu yang berbeda.

### **8. Hubungan antara Inflasi dan Kemiskinan**

Tingkat inflasi berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap karena biasanya kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga (Sukirno, 2004). Inflasi juga akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Nilai riil simpanan di bank, simpanan tunai dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain akan menurun saat terjadi inflasi.

### **9. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak pada penurunan kemiskinan karena berbagai alasan. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditopang oleh sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan kerja rendah, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi seperti ini umumnya lebih memberikan keberpihakan kepada pengembangan sektor sektor tertentu sehingga mempersempit peluang berkembangnya sektor lain, yang pada akhirnya akan berakibat pada berkurangnya jenis lapangan kerja yang tersedia. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun ditopang oleh keberadaan industri milik negara yang memperoleh sejumlah proteksi tertentu juga tidak menjamin akan dapat menyelesaikan kemiskinan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh industri canggih juga berpotensi untuk memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran jika struktur tenaga kerja

yang ada didominasi oleh tenaga kerja berkemampuan rendah (*low skill labor*). Keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditunjang oleh kekuatan ekonomi yang bersifat terkonsentrasi juga tidak akan sanggup mengatasi masalah kemiskinan (Rajasa, 2007).

#### **10. Hubungan antara Pengangguran dan Kemiskinan**

Dalam kaitan antara kemiskinan dan pengangguran, banyak literatur yang menyatakan ada hubungan yang erat antara pengangguran dan kemiskinan, tetapi untuk membuktikannya secara empiris tidaklah mudah. Ada banyak alasan mengapa tingkat pengangguran dan kemiskinan di sebuah negara kadang kala tidak berjalan searah bahkan seringkali bergerak kearah yang berlawanan. Selain karena alasan-alasan dari sisi ekonomi, masalah konsep dan metodologi yang digunakan untuk menghitung tingkat pengangguran dan kemiskinan juga membuat upaya untuk meneliti hubungan kedua variabel tersebut menjadi rumit (Saunders, 2002).

Munandar, Kurniawan dan Santoso (2007) yang melakukan penelitian berdasarkan estimasi perilaku siklikal (*cyclical behaviour*) kemiskinan dan pengangguran, menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan akan turun jika pengangguran turun. Dalam jangka pendek (satu tahun) terdapat hubungan positif yang signifikan antara perubahan tingkat pengangguran dengan perubahan tingkat kemiskinan, yaitu adanya *one-to-one mapping* antara penurunan pengangguran dengan membaiknya tingkat kemiskinan.

## 11. Peran Dunia Usaha dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Indonesia

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat. Aktivitas ekonomi akan menghasilkan barang dan jasa serta nilai tambah ekonomi dan nilai tambah sosial dalam masyarakat. Nilai tambah tersebut dapat berupa kesempatan kerja, pemanfaatan aset/faktor produksi yang tidak produktif menjadi produktif, menghasilkan surplus usaha ataupun nilai tambah sosial. Oleh karena itu, maka semakin tinggi aktivitas ekonomi di suatu daerah, makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan sebaliknya.

Perusahaan pada hakikatnya adalah bagian/sub sistem dari sistem sosial yang keberadaannya tidak bisa lepas dari lingkungan sosial dimana perusahaan berada terutama di sekitar tempat operasi perusahaan. Dua aspek penting harus diperhatikan harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Kemajuan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang merupakan pasar bagi perusahaan adalah kunci sukses keberhasilan operasional perusahaan. Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan dan dari aspek sosial perusahaan harus memberi kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungannya.

Aktivitas bisnis suatu perusahaan menghasilkan barang dan jasa beserta dampaknya bagi masyarakat luas. Sebagian dampak tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat (*benefit to society*) maupun beban atau biaya bagi

masyarakat (*cost on society*). Manfaat bagi masyarakat yang dihasilkan perusahaan dapat berupa :

- a. Penciptaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- b. Penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- c. Pengalokasian sumber daya lebih efisien.

Sedangkan beban atau biaya yang ditanggung masyarakat karena beroperasinya suatu perusahaan di lingkungannya dapat berupa :

- a. Polusi yang dapat merusak kualitas dan kenyamanan lingkungan hidup
- b. Eksploitasi lingkungan dan tenaga kerja
- c. Eksploitasi konsumen

Konsep pemasaran saat ini sudah berada pada tahap dimana konsumen dalam membeli produk suatu perusahaan tidak hanya sekedar memperhatikan suatu produk apakah bisa memenuhi kebutuhan mereka secara lebih efisien daripada pesaingnya, tapi juga dengan kritis melihat apakah keberadaan perusahaan telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga apakah keberadaan perusahaan tidak menjadi bencana di tengah masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kritis konsumen juga selektif melihat apakah suatu perusahaan tidak melakukan hal-hal tidak terpuji seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam, manipulasi pajak dan penindasan terhadap hak-hak buruh.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek

kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program CSR merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan modal finansial yang dapat dihitung nilainya kuantitatif, maka modal sosial tidak dapat dihitung nilainya secara pasti. Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa pengeluaran biaya untuk program-program CSR merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* memberikan keuntungan bagi perusahaan yaitu :

- a. Layak mendapatkan *sosial licence to operate*. Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga perusahaan leluasa menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.

- b. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Hubungan yang kurang harmonis dengan *stakeholders* akan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk *recovery* akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan *stakeholders* perlu mendapat perhatian.
- c. Melebarkan akses sumber daya. *Track records* yang baik dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.
- d. Membentangkan akses menuju pasar. Investasi yang ditanamkan untuk program *Corporate Social Responsibility* ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.
- e. Mereduksi biaya. Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan *Corporate Social Responsibility*. Misalnya dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.
- f. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*. Implementasi *Corporate Social Responsibility* akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan

stakeholder, dimana komunikasi ini akan semakin menambah trust stakeholders kepada perusahaan.

- g. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.
- h. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Image perusahaan yang baik di mata *stakeholders* dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.
- i. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyaknya penghargaan atau *reward* yang diberikan kepada pelaku *Corporate Social Responsibility* sekarang, akan menambah peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan *award*.

Tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar bisa dalam bentuk kemitraan, pengembangan komunitas, dan pelayanan publik. Hal ini memiliki makna ekonomi berupa besarnya dana yang mengalir secara langsung dari perusahaan atau tidak langsung sebagai efek *multiplier* dari perputaran roda ekonomi masyarakat masyarakat. Terbukanya berbagai jenis lapangan kerja baru, berbagai bentuk program mitra kerja perusahaan, dan berkembangnya sektor informal adalah bukti bahwa perusahaan yang melaksanakan CSR pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat daya beli masyarakat sebagai konsumen yang merupakan unsur utama keberlangsungan hidup perusahaan.

Pemberdayaan masyarakat (*community development*) secara umum merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih baik. Masyarakat diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Program pemberdayaan masyarakat memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Sasaran yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat adalah sasaran kapasitas dan sasaran kesejahteraan. Sasaran kapasitas dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*), agar masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kerjasama.

## **B. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Banyak penelitian dilakukan terkait hubungan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Antoni (2010) menganalisis hubungan timbal balik atau kointegrasi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan data tahun 1985-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi mempengaruhi inflasi namun inflasi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang mungkin saja ada pengaruh timbal balik antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti juga melakukan penelitian untuk mengetahui dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Penelitian dilakukan terhadap data sekunder tahun 1999-2006 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan namun pengaruh tersebut relatif tidak besar. Inflasi dan populasi penduduk juga berpengaruh kecil terhadap kemiskinan.

Barika (2013) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera. Penelitian terhadap data sekunder tahun 1999-2006 tersebut menunjukkan bahwa pengangguran terbukti berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien 0,72, sehingga penurunan tingkat pengangguran 1 persen akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,72 persen. Imelia (2012) menyimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian dilakukan pada tahun 2012 terhadap data tahun 1993-2007 di Jambi. Amir (2007) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap pengangguran di Indonesia dengan menggunakan data tahun 1980 – 2005 menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen maka pengangguran akan menurun sekitar 0,46 persen, sedangkan inflasi terbukti tidak ada pengaruh yang nyata terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

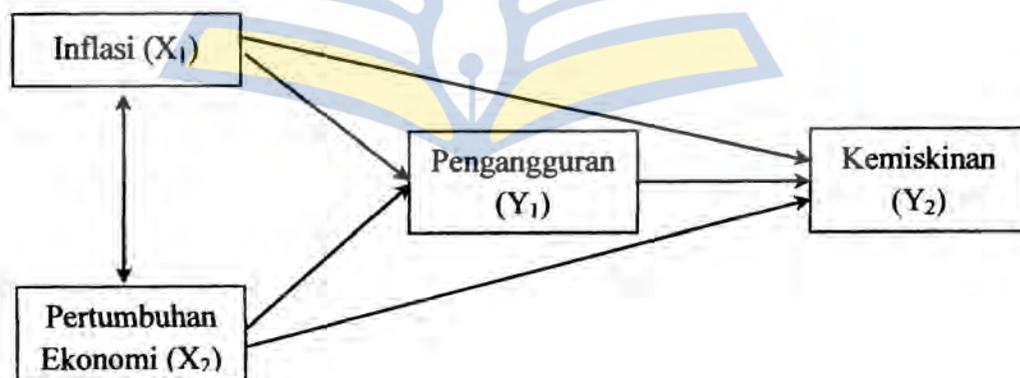
Penelitian yang dilakukan oleh Yarlina Yacoub (2012) menunjukkan bahwa pola hubungan antara pengangguran dan kemiskinan bisa berbeda di setiap wilayah. Penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Namun, data empiris menunjukkan pola hubungan yang tidak selalu searah

antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Siti Amalia (2014) meneliti pengaruh inflasi dan pertumbuhan terhadap pengangguran dan kemiskinan baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Penelitian di Samarinda tersebut menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh langsung terhadap pengangguran, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh langsung terhadap pengangguran. Pengangguran berpengaruh langsung terhadap kemiskinan sedangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan.

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan permasalahan penelitian maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban teoritis atas rumusan masalah penelitian kuantitatif yang dihasilkan melalui teori yang diperoleh dari penelaahan literatur. Hipotesis bersifat sementara dan harus diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Inflasi berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Artinya jika terjadi kenaikan inflasi di Kalimantan Tengah maka pengangguran dan kemiskinan di Kalimantan Tengah juga akan naik.
2. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah berpengaruh secara negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Jika pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah naik, maka tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah akan berkurang atau turun.
3. Tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Tengah berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Artinya jika tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Tengah naik maka tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah juga bertambah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode *explanatory survey*. Penelitian yang bersifat eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian ini bermaksud menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis yaitu pengaruh inflasi ( $X_1$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ ) sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka ( $Y_1$ ) dan tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ) di Kalimantan Tengah.

#### B. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah inflasi ( $X_1$ ), pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ ), tingkat pengangguran terbuka ( $Y_1$ ) dan tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ). Keempat variabel ini merupakan indikator ekonomi yang secara rutin dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi dirilis setiap bulan, pertumbuhan ekonomi dirilis setiap tiga bulan sedangkan pengangguran dan kemiskinan dirilis setiap enam bulan.

##### 1. Inflasi ( $X_1$ )

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang

saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang dan jasa lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam suatu wilayah mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Inflasi di Indonesia dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Sekelompok barang dan jasa tersebut disebut sebagai paket komoditas barang dan jasa. Penentuan jenis barang dan jasa dalam paket komoditas IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Survei Biaya Hidup (SBH) dilaksanakan pada tahun-tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar inflasi. Barang dan jasa dalam paket komoditas tersebut merupakan barang dan jasa yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di suatu wilayah dimana inflasi tersebut diukur. SBH terakhir dilaksanakan tahun 2012 dan digunakan sebagai dasar penghitungan inflasi saat ini. Dari hasil Survei Biaya Hidup tahun 2012 diperoleh paket komoditas dalam penghitungan inflasi yaitu 349 jenis barang dan jasa di Kota Palangka Raya dan 338 jenis barang dan jasa di Kota Sampit. Selanjutnya, BPS akan memonitor

perkembangan harga barang dan jasa tersebut di beberapa kota di Indonesia (termasuk Kota Palangka Raya dan Sampit di Kalimantan Tengah).

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose - COICOP*), yaitu :

- a. Bahan makanan
- b. Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau
- c. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar
- d. Sandang
- e. Kesehatan
- f. Pendidikan, rekreasi, dan olahraga
- g. Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan

Indeks Harga Konsumen (IHK) dihitung dengan menggunakan suatu rumus yaitu Indeks Laspeyres yang sudah disesuaikan atau dimodifikasi (*Modified Laspeyres*) sebagai berikut :

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} \cdot Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{oi} \cdot Q_{oi}} \times 100$$

dimana :

$I_n$  = Indeks bulan ke-n

$P_{ni}$  = Harga suatu jenis barang pada bulan berjalan (n)

$P_{(n-1)i}$  = Harga suatu jenis barang pada bulan sebelumnya (n-1)

$P_{(n-1)i} \cdot Q_{oi}$  = Nilai konsumsi (NK) suatu jenis barang pada bulan sebelumnya (n-1)

$P_{oi} \cdot Q_{oi}$  = Nilai konsumsi (NK) suatu jenis barang pada tahun dasar

$k$  = Jumlah jenis barang/jasa yang tercakup dalam paket komoditas IHK

Sedangkan untuk menghitung persentase perubahan indeks atau laju inflasi/deflasi, digunakan rumus :

$$\text{Inflasi}_t = \frac{(\text{IHK})_t - (\text{IHK})_{t-1}}{(\text{IHK})_{t-1}} \times 100$$

dimana :

$\text{IHK}_t = \text{IHK}$  bulan ke-t dan  $\text{IHK}_{t-1} = \text{IHK}$  bulan t-1

Inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi umum atau gabungan dari tujuh kelompok pengeluaran di Kalimantan Tengah yang merupakan gabungan dari inflasi Kota Palangka Raya dan Sampit. Periode data adalah tahunan dan diukur dalam satuan persen.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi ( $X_2$ )

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana terjadi peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 sebagai tahun dasar dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$PE_t = \frac{(\text{PDRBadhk})_t - (\text{PDRBadhk})_{t-1}}{(\text{PDRBadhk})_{t-1}} \times 100$$

dimana :

$\text{PDRBadhk}_t = \text{PDRB}$  atas dasar harga konstan 2010 pada tahun ke-t

$\text{PDRBadhk}_{t-1} = \text{PDRB}$  atas dasar harga konstan 2010 pada tahun t-1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu daerah/wilayah pada periode waktu tertentu. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB umumnya disajikan menurut harga berlaku (*current price*) dan harga konstan (*constant price*).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun dasar 2010. Salah satu indikator turunan PDRB adalah pertumbuhan ekonomi.

Badan Pusat Statistik menghitung PDRB dan pertumbuhan ekonomi dari dua sisi pendekatan yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. PDRB yang dihitung melalui pendekatan produksi menghasilkan PDRB menurut lapangan usaha yang dirinci menurut 17 kategori lapangan usaha yaitu :

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Pengadaan Listrik dan Gas
- e. Pengadaan Air
- f. Konstruksi

- g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- h. Transportasi dan Pergudangan
- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- j. Informasi dan Komunikasi
- k. Jasa Keuangan
- l. Real Estat
- m. Jasa Perusahaan
- n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- o. Jasa Pendidikan
- p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- q. Jasa Lainnya

Sedangkan PDRB yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran menghasilkan PDRB menurut pengeluaran yang dirinci menurut 7 komponen pengeluaran yaitu :

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- b. Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga
- c. Pengeluaran konsumsi pemerintah
- d. Pembentukan modal tetap bruto
- e. Perubahan inventori
- f. Ekspor
- g. Impor

PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dengan dua pendekatan tersebut menghasilkan angka total PDRB dan total pertumbuhan ekonomi yang

sama. PDRB dan pertumbuhan ekonomi dihitung dan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari dua pendekatan tersebut setiap tiga bulan sekali atau periode data triwulanan dan tahunan. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi tahunan dari keseluruhan lapangan usaha di Kalimantan Tengah atau keseluruhan komponen pengeluaran di Kalimantan Tengah. Pertumbuhan ekonomi diukur dalam satuan persen.

### 3. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT ( $Y_1$ )

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Jumlah penganggur adalah jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi berharap mendapat pekerjaan, dan kegiatannya terdiri dari :

- a. Mencari pekerjaan
- b. Mempersiapkan usaha
- c. Tidak mencari pekerjaan karena alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa)
- d. Tidak mencari pekerjaan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Sementara, angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas baik yang sedang bekerja maupun yang sedang menganggur. Indikator tingkat pengangguran terbuka dinyatakan dalam satuan persen.

#### 4. Tingkat Kemiskinan (Y<sub>2</sub>)

Tingkat kemiskinan dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dan dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Indikator ini dinyatakan dalam persen dengan periode tahunan.

#### C. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan secara rutin dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Sumber data utama adalah Berita Resmi Statistik (BRS) dan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. BRS dan publikasi tersebut dapat diunduh dari website BPS maupun dari Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Untuk melengkapi data dan referensi yang diperlukan dalam penyusunan

tesis ini, maka ditempuh cara riset kepustakaan (*library reseacrh*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan dari berbagai literatur untuk memperoleh informasi atau peralatan dasar yang berkaitan dengan penelitian seperti majalah, buletin, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

#### **D. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode statistik yaitu analisis regresi untuk keperluan estimasi. Analisis regresi digunakan untuk menentukan determinan penentu terhadap variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pengangguran dan kemiskinan. Diasumsikan bahwa variabel independen yaitu variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan perilaku variabel dependen tersebut.

Hubungan antar variabel dalam ilmu sosial maupun kependudukan sering bersifat hubungan berjenjang. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui variabel lain. Variabel lain menjembatani pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut dengan variabel antara. Variabel perantara (*intervening variable*) merupakan variabel yang menerima pengaruh dari banyak variabel bebas, yang kemudian variabel ini mempengaruhi secara langsung terhadap variabel terikat. Antar variabel bebas juga mempunyai pola hubungan yang tidak tetap artinya bisa benar-benar bebas, berkorelasi tetapi tidak signifikan, mempunyai hubungan yang tidak erat. Untuk menganalisis pola hubungan yang tidak langsung tersebut maka diperlukan analisis khusus yaitu analisis jalur.

Analisis jalur atau *path analysis* dikembangkan pertama kali tahun 1920-an oleh Sewall Wright. Model ini digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Manfaat analisis jalur antara lain :

1. Menjelaskan fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti.
2. Memprediksi nilai variabel terikat (Y) berdasarkan nilai variabel bebas (X).
3. Menentukan variabel bebas mana yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat dan menelusuri mekanisme (jalur-jalur) pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
4. Menguji model baik uji reliabilitas konsep yang sudah ada maupun untuk uji pengembangan konsep baru.

Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linier ganda yang mengakomodasi adanya pengaruh tidak langsung antara variabel dalam penelitian, disamping adanya pengaruh langsung. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  terhadap  $Y_1$  serta dampaknya terhadap  $Y_2$ .

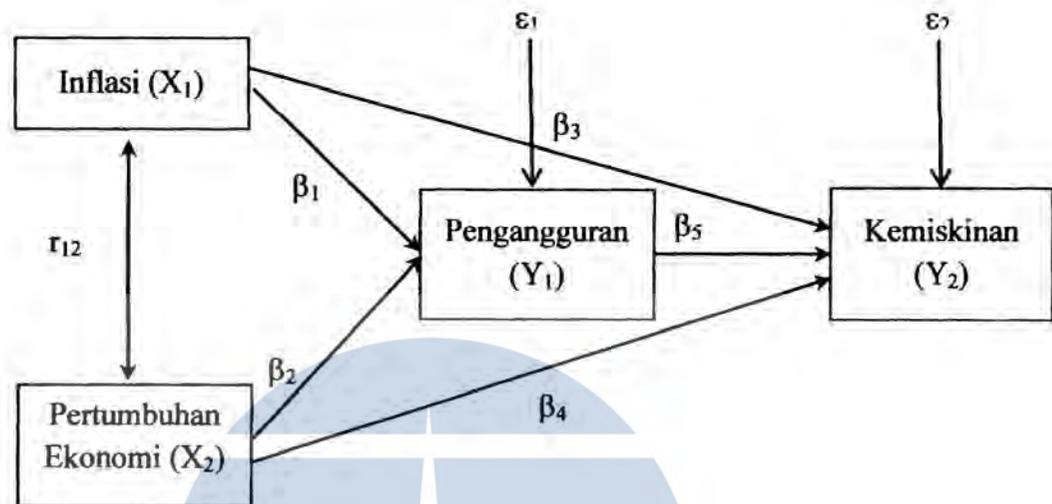
Karena analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis regresi, maka persyaratan dalam menggunakan analisis regresi harus juga dipenuhi dalam menggunakan analisis jalur. Beberapa prinsip dasar yang perlu dipenuhi adalah :

1. Hubungan antar variabel bersifat linier, adaptif dan bersifat normal.
2. Sistem kausal satu arah, artinya tidak ada arah kausal yang berbalik.
3. Variabel terikat (endogen) minimal dalam skala ukur interval dan rasio.

4. Menggunakan sampel *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi anggota sampel.
5. *Observed variables* diukur tanpa kesalahan, instrumen pengukuran valid dan *reliable* artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi secara langsung.
6. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan, artinya model teori dikaji atau dibangun berdasarkan kerangka teoritis tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti.
7. Antar variabel bebas mempunyai hubungan (multikolinieritas) yang rendah, atau variabel bebas benar-benar bebas atau besaran hubungannya tidak signifikan. Jika antar variabel bebas terdapat hubungan yang signifikan maka sebaiknya digunakan salah satu dari variabel yang saling berhubungan tersebut. Korelasi antara variabel bebas dengan variabel perantara signifikan, begitu pula korelasi antara variabel perantara dengan variabel terikat juga signifikan dan didukung dengan teori yang kuat. Sampel penelitian hendaknya besar sehingga analisis jalur akan memberi makna yang tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa analisis jalur dimaksudkan untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel, sebagai penyebab terhadap variabel akibat atau variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah inflasi ( $X_1$ ), pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ ), tingkat pengangguran terbuka ( $Y_1$ ) dan tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ) dengan hubungan kausal sebagai berikut :

Gambar 3.1  
Diagram Jalur Hubungan Kausal Inflasi ( $X_1$ ), Pertumbuhan Ekonomi ( $X_2$ ),  
Pengangguran ( $Y_1$ ) dan Kemiskinan ( $Y_2$ )



Berdasarkan teori yang diperoleh maka dibangun persamaan sebagai berikut :

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_1 \dots \dots \dots \text{Persamaan 1)}$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + \epsilon_2 \dots \dots \dots \text{Persamaan 2)}$$

Untuk menguji kebaikan dari model dalam memprediksi variabel dependen digunakan ukuran koefisien determinasi. Koefisien determinasi memberikan panduan kebaikan model dengan menjelaskan seberapa besar perubahan dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen.

## **E. Pengujian Hipotesis**

### **1. Uji Asumsi Klasik**

Sebelum data diinterpretasikan terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar dapat diperoleh estimasi terbaik dan tidak bias (*Best Linier Unbiased Estimator/BLUE*). Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji Normalitas, Multikolinieritas, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas.

#### **a. Uji Normalitas Data**

Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk menguji data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik.

Pengujian apakah distribusi data normal atau tidak dalam penelitian ini digunakan dengan melihat *normal probability plot*, yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Multikolinieritas terjadi jika terdapat hubungan yang sempurna atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel independen dalam model. Pada kasus multikolinieritas yang serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen dalam model. *Multikolinierity* berarti

adanya hubungan yang sempurna atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Gujarati, 2003).

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan dalam model bebas dari penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas (Gujarati, 2003).

### c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (Gujarati, 2003). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbansi atau gangguan. Dengan kata lain unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur disturbansi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain manapun.

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW).

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $d_w$  pengujian dengan nilai  $d_U$  yaitu nilai batas atas dari tabel Durbin-Watson dan  $d_L$  yaitu nilai batas bawah dari tabel Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1) Deteksi Autokorelasi Positif :

Jika  $dw < d_L$  maka terdapat autokorelasi positif, jika  $dw > d_U$  maka tidak terdapat autokorelasi positif dan jika  $d_L < dw < d_U$  maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

### 2) Deteksi Autokorelasi Negatif :

Jika  $(4 - dw) < d_L$  maka terdapat autokorelasi negatif,  $(4 - dw) > d_U$  maka tidak terdapat autokorelasi negatif, dan jika  $d_L < (4 - dw) < d_U$  maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

### d. Uji Heterokedastisitas

Asumsi penting dari model regresi linear klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance term*) yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah *homokedastisitas*, yaitu semua *disturbance term* mempunyai varian yang sama. Pengujian terhadap gejala Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola titik-titik pada scatter plots regresi. Metodenya adalah dengan membuat grafik plot atau scatter antara "*Standardized Predicted Value (ZPRED)*" dengan "*Studentized Residual (SRESID)*". Ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED adalah sumbu Y dimana sumbu Y yang telah diprediksi dan Sumbu X adalah Residual ( $Y \text{ Prediksi} - Y \text{ Sesungguhnya}$ ). Kriteria pengujian hipotesisnya adalah  $H_0$  : Tidak ada gejala heteroskedastisitas, apabila tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y; dan  $H_a$ : Ada gejala heteroskedastisitas apabila ada pola tertentu yang jelas, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit).

## 2. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini dilakukan dengan model *Ordinary Least Square (OLS)* untuk data time series 12 tahun (2004-2015) dengan menggunakan Program SPSS 18.0. Metode OLS mempunyai beberapa sifat statistik yang diperlukan sebagai alat regresi untuk penaksiran parameter dan pengujian hipotesis.

### a. Uji t

Pengujian Parsial dengan uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ , artinya tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian juga dapat dilakukan dengan melihat signifikansi masing-masing  $t_{hitung}$  hasil pengolahan dengan program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* yaitu jika kolom signifikansi pada tabel Anova lebih kecil dari tingkat kepercayaan atau alpha (dalam penelitian ini digunakan tingkat kepercayaan  $\alpha = 5\%$ ) maka hipotesis diterima.

### b. Uji F

Uji F atau uji serentak atau uji model/uji Anova digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh bersama-sama semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model terhadap variabel terikatnya. Uji ini juga digunakan untuk menguji apakah

model regresi yang dibuat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Hasil uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Hipotesis nol yang hendak diuji adalah apakah semua koefisien dalam model sama dengan nol, artinya semua variabel bebas bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatifnya tidak semua koefisien secara simultan sama dengan nol, artinya semua variabel bebas secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ , semua variabel bebas secara bersama-sama bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan melihat kolom signifikansi pada tabel Anova hasil output SPSS yaitu jika kolom signifikansi pada tabel Anova lebih kecil dari tingkat kepercayaan atau alpha (dalam penelitian ini digunakan tingkat kepercayaan  $\alpha = 5\%$ ) maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  atau model signifikan.

Sementara koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mendeteksi ketepatan paling baik dari model regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi  $R^2$ . Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah antara angka nol dan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Koefisien determinasi bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sedangkan jika bernilai satu berarti suatu kecocokan sempurna dari ketepatan model.

## BAB IV

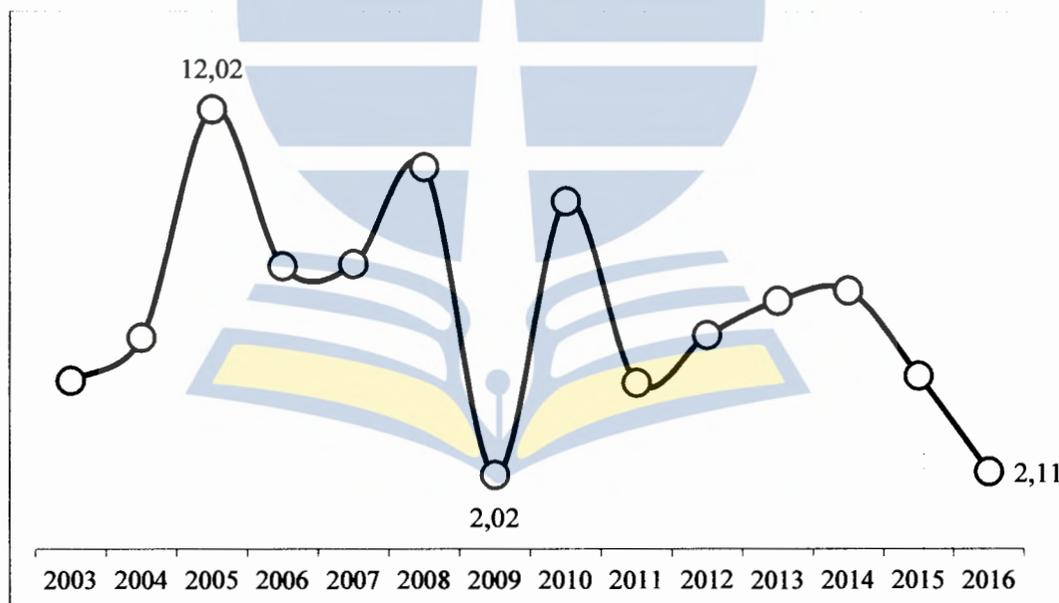
### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Inflasi Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah mengalami inflasi 2,11 persen pada tahun 2016. Inflasi ini merupakan inflasi terendah kedua yang terjadi di Kalimantan Tengah selama tahun 2003 – 2016. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 yang sebesar 2,02 persen. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 12,02 persen.

Gambar 4.1  
Inflasi Kalimantan Tengah Tahun 2003 – 2016 (Persen)



Jika dilihat masing-masing kelompok pengeluaran, maka pengeluaran kesehatan mengalami inflasi tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,18 persen. Inflasi tertinggi kedua terjadi pada kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga yang mengalami inflasi 4,4 persen. Sementara inflasi terendah, terjadi pada pengeluaran bahan makanan yaitu 0,17 persen.

Sementara itu jika dilihat andil masing-masing kelompok pengeluaran, inflasi 2,11 persen yang terjadi di Kalimantan Tengah tahun 2016 disebabkan oleh inflasi makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang memiliki andil terbesar yaitu 0,72 persen, kemudian kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang berkontribusi 0,58 persen terhadap inflasi Kalimantan Tengah tahun 2016. Sedangkan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menjadi kontributor terkecil yaitu 0,05 persen.

Tabel 4.1  
Inflasi dan Andil Inflasi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016

No	Kelompok Pengeluaran	Inflasi (%)	Andil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bahan makanan	0,17	0,07
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	3,72	0,72
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	2,60	0,58
4	Sandang	2,95	0,19
5	Kesehatan	5,18	0,22
6	Pendidikan, rekreasi dan olah raga	4,40	0,28
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0,32	0,05
<b>Total (Inflasi Umum)</b>		<b>2,11</b>	<b>2,11</b>

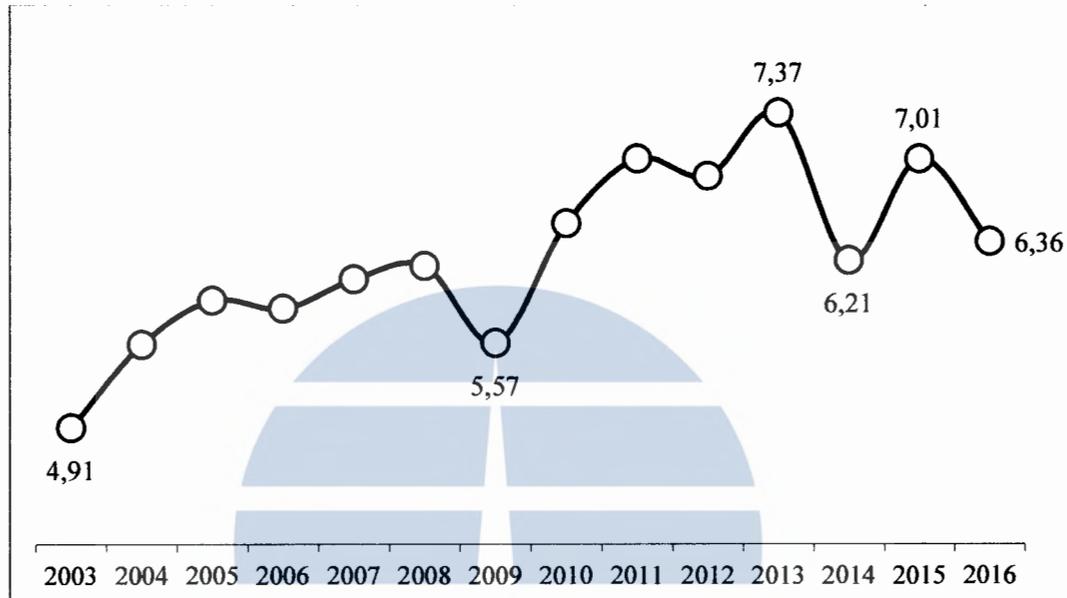
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

## 2. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,24 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,37 persen dan terendah pada tahun 2003 yang sebesar 4,91 persen. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kalimantan

Tengah sebesar 6,36 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang mampu tumbuh 7,01 persen.

Gambar 4.2  
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2003 – 2016 (Persen)



Struktur perekonomian Kalimantan Tengah tahun 2016 didominasi oleh empat sektor utama, yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,94 persen); Sektor Industri Pengolahan (16,33 persen); Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,68 persen) dan Sektor Pertambangan dan Penggalian 10,82 persen. Keempat sektor ini memberikan kontribusi sebesar 60,77 persen dalam pembentukan PDRB Kalimantan Tengah tahun 2016. Sementara itu kontribusi sektor-sektor lainnya relatif lebih kecil yaitu dibawah 10 persen.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2016 tumbuh sebesar 3,77 persen dan menyumbang 0,81 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2016. Komoditas kelapa sawit dan karet menjadi andalan sektor ini. Perkebunan kelapa sawit dan karet terus mengalami

peningkatan produksi baik perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan maupun perkebunan rakyat. Tanaman pangan seperti padi, palawija dan hortikultura juga terus berkembang.

Sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 7,48 persen dan menyumbang 1,13 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2016. Industri besar yang banyak terdapat di Kalimantan Tengah adalah industri pengolahan kelapa sawit dengan produk utama minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*). Industri pengolahan kayu, karet dan rotan juga banyak terdapat di daerah ini. Selain industri besar, industri kerajinan rumah tangga, industri kecil dan industri menengah dengan berbagai jenis produk juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 6,68 persen dan menyumbang 0,73 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Pembangunan infrastruktur termasuk jalan dan jembatan berhasil menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan Tengah dan memperlancar arus barang antar kabupaten/kota di Kalimantan Tengah maupun antar provinsi. Kegiatan perdagangan menjadi semakin maju baik perdagangan bahan makanan dan minuman maupun barang-barang bukan makanan.

Sedangkan Sektor Pertambangan dan Penggalian mampu tumbuh sebesar 7,51 persen pada tahun 2016 dan menyumbang 1,21 persen. Komoditas batu bara dan bijih logam menjadi andalan dari sektor ini. Tingginya permintaan baik dari luar negeri maupun dalam negeri menyebabkan sektor ini mampu terus tumbuh dan berperan dalam memajukan ekonomi Kalimantan Tengah. Keempat sektor utama tersebut menyumbang 3,88 persen terhadap pertumbuhan ekonomi

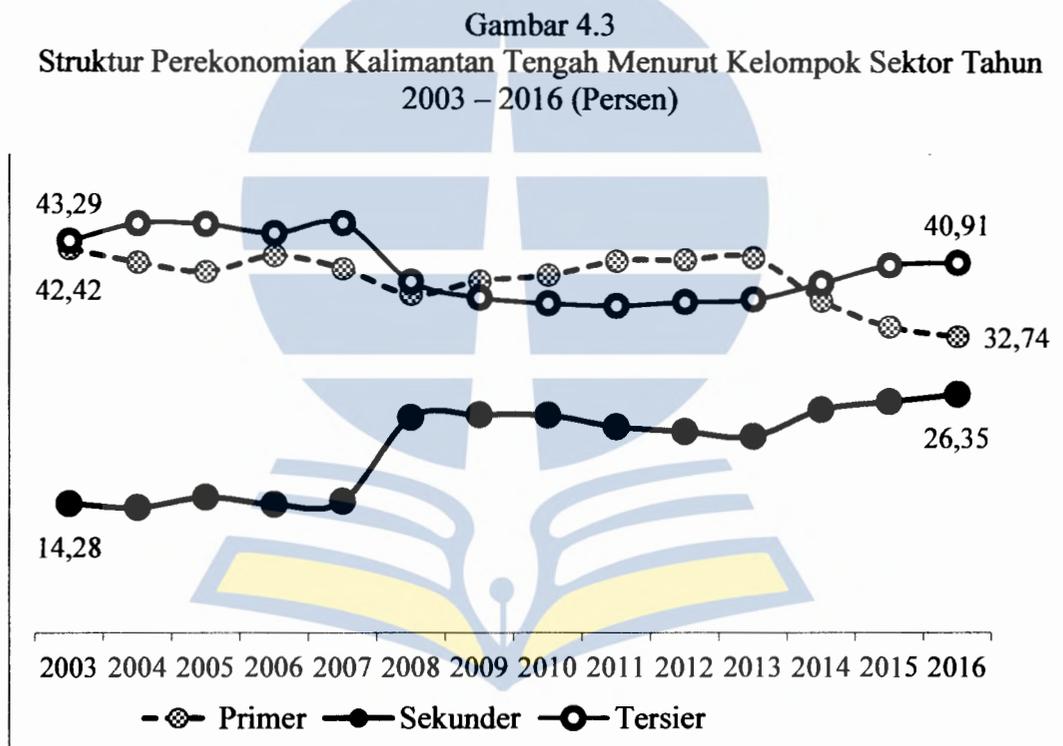
Kalimantan Tengah tahun 2016 yang secara total tumbuh sebesar 6,36 persen. Keempat sektor ini menjadi sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian di Kalimantan Tengah.

Tabel 4.2  
Kontribusi dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Kalimantan Tengah Tahun 2016 (Persen)

Kode	Lapangan Usaha	PDRB (Milyar Rp)	Kontri- busi (%)	Pertum- buan (%)	Sumber Pertum- buan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.665,4	21,94	3,77	0,81
B	Pertambangan dan Penggalian	12.165,2	10,82	7,51	1,21
C	Industri Pengolahan	18.359,1	16,33	7,48	1,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	82,4	0,07	10,34	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	104,6	0,09	3,13	0,00
F	Konstruksi	10.873,4	9,67	7,24	0,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.133,1	11,68	6,68	0,73
H	Transportasi dan Pergudangan	7.749,3	6,89	10,62	0,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.192,0	1,95	8,33	0,14
J	Informasi dan Komunikasi	1.096,8	0,98	6,24	0,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.267,8	3,23	7,49	0,24
L	Real Estate	2.441,5	2,17	6,06	0,12
M,N	Jasa Perusahaan	42,5	0,04	6,04	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.018,6	6,24	2,99	0,18
P	Jasa Pendidikan	5.512,2	4,90	6,18	0,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.190,7	1,95	5,26	0,09
R,S, T,U	Jasa lainnya	1.186,7	1,06	6,85	0,07
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>112.441,2</b>	<b>100,00</b>	<b>6,36</b>	<b>6,36</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Struktur ekonomi Kalimantan Tengah mengalami pergeseran dari perekonomian yang mengandalkan sumber daya alam atau sektor primer menjadi perekonomian yang mengandalkan sektor jasa atau tersier. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya proporsi sektor primer dalam perekonomian Kalimantan Tengah dan semakin meningkatnya kontribusi sektor tersier. Sektor primer berkontribusi sebesar 32,74 persen terhadap PDRB Kalimantan Tengah tahun 2016, sedangkan sektor tersier (sektor jasa-jasa) berperan sebesar 40,91 persen. Sementara sektor sekunder (sektor manufaktur) berperan sebesar 26,35 persen.



Sektor primer yaitu sektor-sektor yang mengandalkan sumber daya alam yang meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian secara rata-rata tumbuh 5 persen per tahun selama 2003 – 2016. Sektor primer berkontribusi rata-rata 39,15 persen terhadap perekonomian Kalimantan Tengah. Sementara sektor sekunder atau sektor manufaktur mengalami pertumbuhan rata-rata 6,22 persen per tahun dengan

kontribusi rata-rata 20,49 persen terhadap perekonomian Kalimantan Tengah. Sedangkan sektor tersier atau sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2003 – 2016. Sektor ini mampu tumbuh rata-rata 7,51 persen dengan kontribusi terbesar yaitu 40,36 persen terhadap perekonomian Kalimantan Tengah.

Tabel 4.3  
Kontribusi dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Kalimantan Tengah Menurut Sektor Tahun 2003 – 2016 (Persen)

Tahun	Pertumbuhan (%)				Distribusi (%)		
	Primer	Sekunder	Tersier	Total	Primer	Sekunder	Tersier
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2003	3,72	4,35	6,43	4,91	42,42	14,28	43,29
2004	2,51	6,72	8,47	5,56	40,95	13,84	45,21
2005	7,70	3,49	4,86	5,90	39,92	14,97	45,11
2006	7,30	1,74	5,66	5,84	41,67	14,20	44,14
2007	3,16	8,92	8,26	6,06	40,24	14,53	45,23
2008	0,99	7,37	11,10	6,17	37,40	23,79	38,81
2009	4,96	6,16	5,95	5,57	38,89	24,07	37,04
2010	4,89	5,81	8,20	6,50	39,54	24,03	36,43
2011	7,93	2,87	8,74	7,01	41,09	22,76	36,15
2012	6,11	6,27	8,07	6,87	41,21	22,23	36,56
2013	8,79	6,23	6,55	7,37	41,46	21,71	36,83
2014	2,35	11,6	7,10	6,21	36,72	24,64	38,63
2015	4,16	8,04	9,29	7,01	33,85	25,53	40,62
2016	5,42	7,57	6,52	6,36	32,74	26,35	40,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

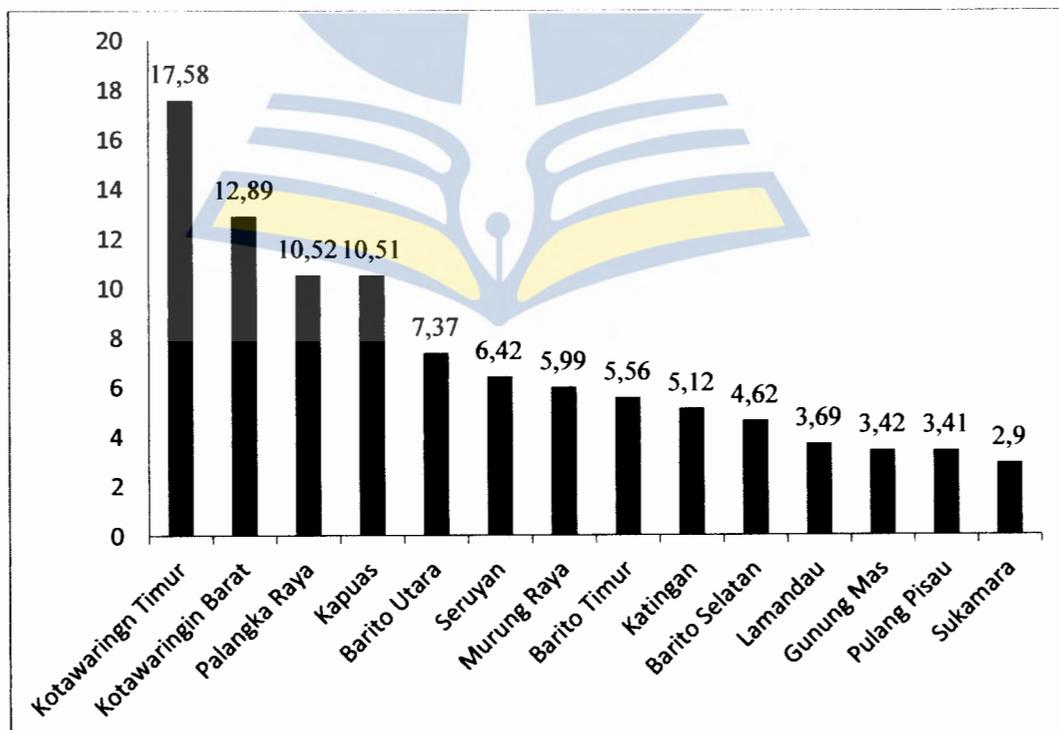
Kalimantan Tengah terdiri dari 14 kabupaten/kota. Kontribusi PDRB masing-masing kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah terlihat dalam Gambar 4.4. Kotawaringin Timur memiliki kontribusi terbesar yaitu 17,58 persen dengan sektor utama perkebunan, industri dan perdagangan. Kotawaringin Barat yang berkontribusi sebesar 12,89 persen dengan sektor andalan adalah sektor industri, perkebunan dan perdagangan. Keberadaan

pelabuhan laut dan bandara di kedua kabupaten tersebut menjadi salah satu penggerak perekonomian di kedua wilayah tersebut.

Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi sebesar 10,52 persen dengan sektor andalan sektor jasa dan perdagangan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan dan perannya sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Kota Palangka Raya tumbuh sebagai kota yang maju dalam industri jasa dan pemerintahan.

Sementara Kapuas dengan sektor utama pertanian tanaman pangan berkontribusi sebesar 10,51 persen. Kapuas dikenal sebagai sentra produksi padi di Kalimantan Tengah. Keempat kabupaten/kota tersebut berkontribusi sebesar 51,5 persen. Sepuluh kabupaten yang lain berkontribusi sekitar 48,5 persen.

Gambar 4.4  
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 (Persen)



### **3. Program Pengendalian Inflasi dan Pengawasan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**

Pedoman pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomo 10 Tahun 2015 Tanggal 25 Maret 2015 tentang Pedoman Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan stabilisasi harga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan struktural dalam perekonomian daerah, baik yang ada di tingkat produksi, distribusi, hingga penyelesaian terkait struktur pasar dan akses informasi. Rencana aksi pengendalian inflasi tersebut antara lain menjaga kelancaran arus distribusi barang kebutuhan pokok, menjaga dan mengelola ekspektasi masyarakat terkait dampak inflasi, menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga beberapa komoditas penyumbang inflasi seperti bawang merah, beras, cabe, daging sapi dan daging ayam, dan mengidentifikasi potensi ekonomi daerah dalam rangka mendorong pengembangan UMKM.

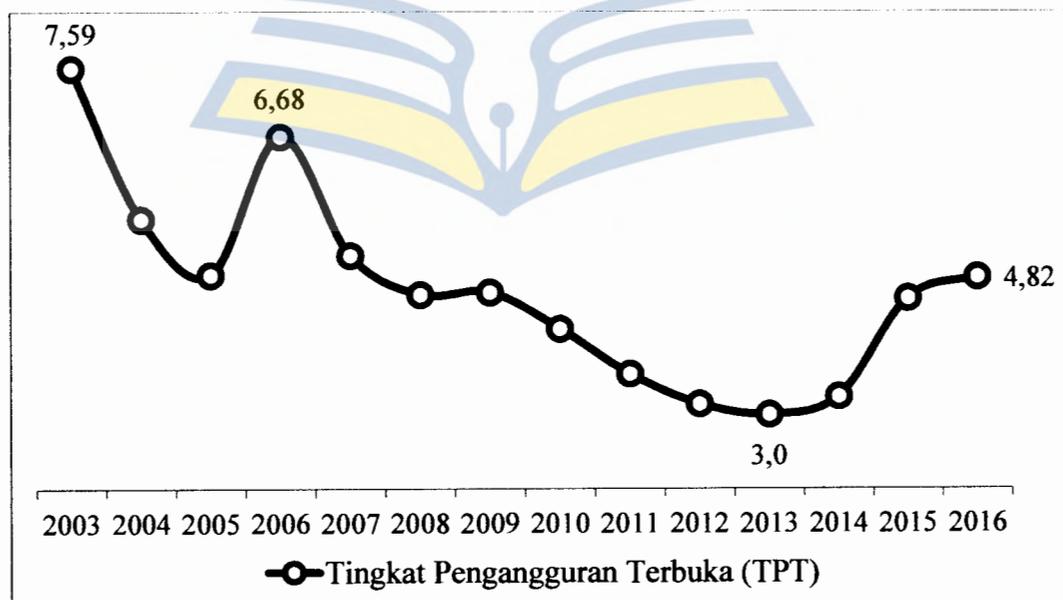
Peraturan Gubernur sebagai pedoman pengawasan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah juga telah ditetapkan, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 25 Maret 2015 tentang Pedoman Pengawasan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan ditetapkannya pedoman tersebut adalah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas dan kuantitas daya saing ekonomi daerah. Pengawasan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara membandingkan rencana dan realisasi pencapaian pembentukan PDRB dari masing-masing sektor dan sub

sektor pada kurun waktu tertentu baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

#### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Tengah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Tengah tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan. Tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Tengah tahun 2016 sebesar 4,82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 5 orang merupakan pengangguran. Selama tahun 2003 sampai tahun 2013 tingkat pengangguran Kalimantan Tengah sebenarnya menunjukkan trend menurun. Kenaikan tingkat pengangguran hanya terjadi pada tahun 2006 yang naik menjadi 6,68 persen. Namun pada kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung meningkat.

Gambar 4.5  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Tengah Tahun 2003 – 2016 (Persen)



Jika dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran terbanyak terjadi pada penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) sebesar 9,17 persen. Sedangkan pengangguran terendah terjadi pada penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan Sekolah Dasar yaitu 2,19 persen.

Tabel 4.4  
Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penduduk 15 tahun keatas	Ribu jiwa	1.740,38	1.789,52	1.839,21
2	Angkatan Kerja	Ribu jiwa	1.193,17	1.272,46	1.311,43
3	Penduduk Bekerja	Ribu jiwa	1.154,49	1.214,68	1.248,19
4	Pengangguran	Jiwa	38.682	57.780	63.238
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	68,56	71,11	71,30
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,24	4,54	4,82
7	TPT Menurut Pendidikan Tertinggi ditamatkan				
	SD ke Bawah	Persen	1,64	2,6	2,19
	Sekolah Menengah Pertama	Persen	3,17	4,1	3,75
	Sekolah Menengah Atas	Persen	6,22	8,5	9,17
	Perguruan Tinggi	Persen	4,37	4,53	7,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Sementara tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota tahun 2015 terlihat bervariasi antar kabupaten/kota. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2015 di Kabupaten Barito Selatan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Tengah yaitu 9,99 persen. Sedangkan TPT terendah tahun

2015 terjadi di Kabupaten Barito Timur sebesar 2,14 persen. TPAK yang tinggi dan TPT yang rendah di Kabupaten Barito Timur menunjukkan bahwa daerah ini mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk yang sedang mencari pekerjaan

Tabel 4.5  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2012 – 2015 (persen)

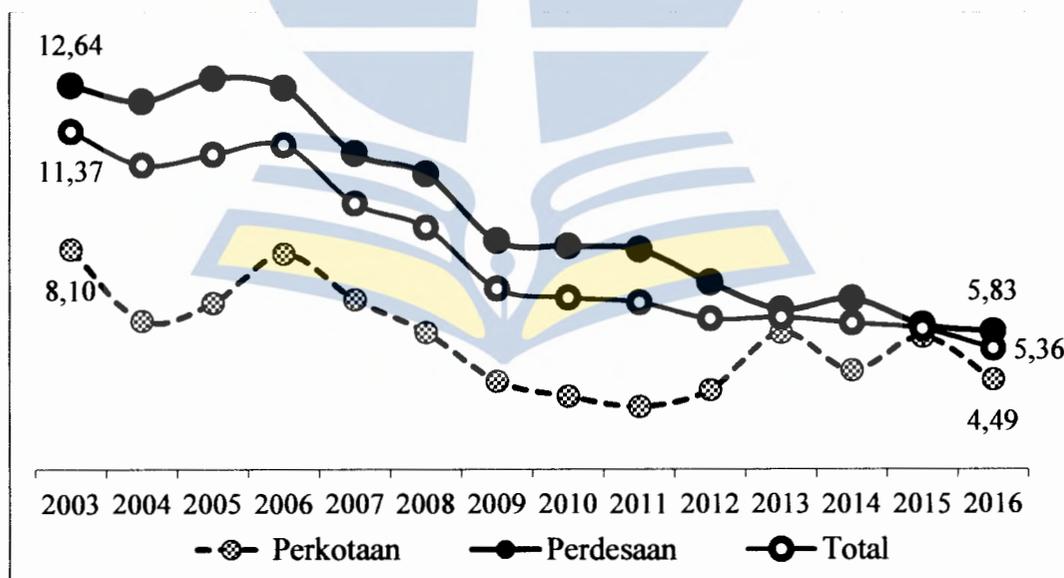
No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kotawaringin Barat	2,30	3,65	2,66	3,25
2	Kotawaringin Timur	4,51	2,37	4,11	3,53
3	Kapuas	3,00	1,49	2,50	4,07
4	Barito Selatan	1,72	2,10	3,77	9,99
5	Barito Utara	1,65	2,93	3,34	4,78
6	Sukamara	0,31	1,83	1,67	4,68
7	Lamandau	0,92	1,64	2,61	5,00
8	Seruyan	3,99	4,52	4,40	4,64
9	Katingan	3,35	5,56	5,23	5,97
10	Pulang Pisau	2,52	2,30	4,28	3,29
11	Gunung Mas	4,31	2,88	1,20	2,70
12	Barito Timur	0,93	1,65	2,46	2,14
13	Murung Raya	1,49	3,45	1,13	6,33
14	Palangka Raya	6,40	5,03	3,36	6,30
	Kalimantan Tengah	3,14	3,00	3,24	4,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

## 5. Tingkat Kemiskinan Kalimantan Tengah

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah tahun 2003 mencapai 11,37 persen. Angka ini terus menurun dan menjadi 5,36 persen pada tahun 2016. Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan. Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan sebesar 4,49 persen, sedangkan di daerah pedesaan mencapai sebesar 5,83 persen. Meskipun tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan, namun penurunan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih terlihat daripada di perkotaan. Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan dan perkotaan hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan semakin kecil.

Gambar 4.6  
Tingkat Kemiskinan Kalimantan Tengah Tahun 2003 – 2016 (Persen)



Penurunan tingkat kemiskinan juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya mengalami tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,81 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Barito Timur yaitu sebesar 8,55 persen.

Tabel 4.6  
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dan  
Kalimantan Tahun 2011 – 2014 (persen)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	6,19	5,63	5,44	5,27
Kotawaringin Timur	7,43	6,90	6,85	6,67
Kapuas	6,28	6,10	6,19	6,12
Barito Selatan	7,56	7,25	6,26	6,13
Barito Utara	6,33	6,10	5,98	5,88
Sukamara	5,90	5,36	4,56	4,29
Lamandau	5,18	4,66	4,87	4,66
Seruyan	8,82	7,91	8,77	8,39
Katingan	6,47	6,10	6,55	6,42
Pulang Pisau	5,45	5,24	5,45	5,35
Gunung Mas	7,12	6,56	6,90	6,70
Barito Timur	9,27	8,52	8,83	8,55
Murung Raya	6,30	5,78	6,44	6,24
Palangka Raya	4,69	4,24	3,94	3,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

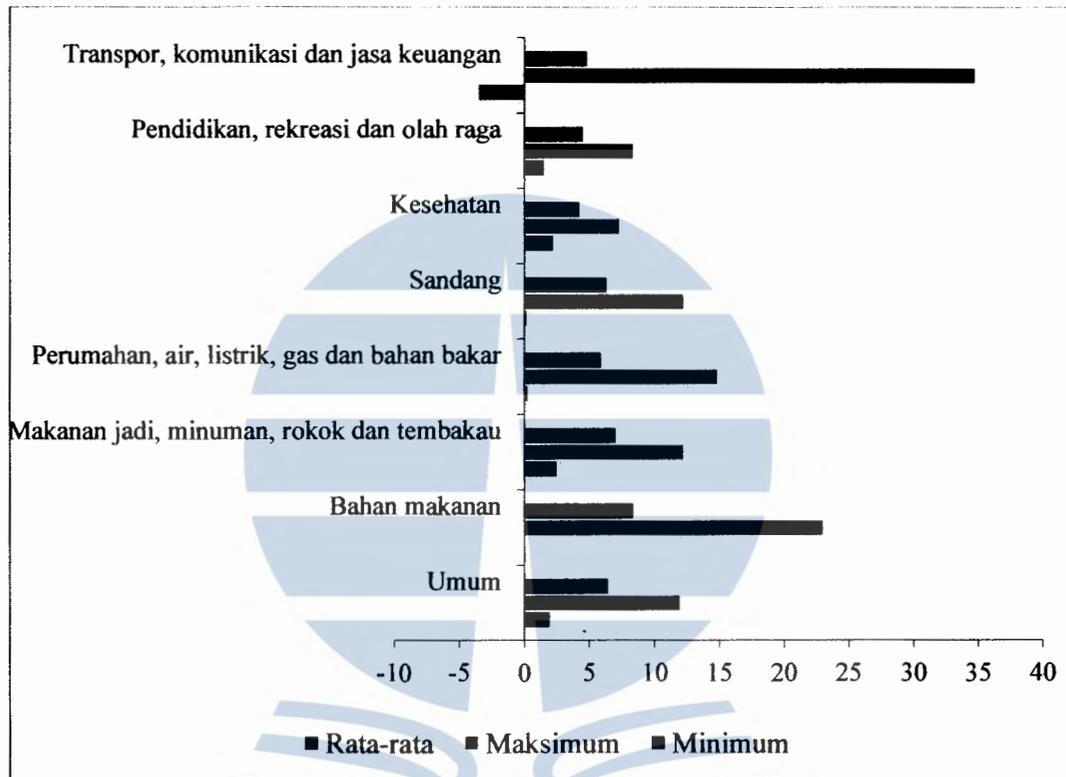
## B. Hasil Pengolahan Data

### 1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Selama tahun 2003 – 2016 Kalimantan Tengah secara rata-rata mengalami inflasi sebesar 6,50 persen. Inflasi tertinggi sebesar 12,02 persen dan terendah sebesar 2,02 persen. Rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan yang mengalami inflasi rata-rata sebesar 8,41 persen selama tahun 2003 – 2016. Sementara rata-rata inflasi terendah terjadi pada kelompok pengeluaran kesehatan yang mengalami inflasi rata-rata sebesar 2,39

persen pada tahun 2003 – 2016. Variasi inflasi terbesar terjadi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami inflasi dari -3,59 persen sampai 34,81 persen.

Gambar 4.7  
Inflasi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2003 – 2016  
(Persen)



Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah secara rata-rata mencapai 6,46 persen. Sektor tersier mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi. Kelompok sektor ini mampu tumbuh rata-rata 7,96 persen per tahun selama 2003 – 2016. Sementara sektor sekunder rata-rata pertumbuhannya hanya 5,04 persen per tahun. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan yang menjadi variabel terikat pada penelitian ini memiliki rata-rata 4,26 persen dan 4,68 persen.

Tabel 4.7  
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Kode Variabel	Nama Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
X <sub>1</sub>	<b>Inflasi</b>				
X <sub>1</sub>	Umum	2,02	12,02	6,50	2,90
X <sub>1.1</sub>	Bahan makanan	0,17	23,07	8,41	6,76
X <sub>1.2</sub>	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2,53	12,31	7,07	2,44
X <sub>1.3</sub>	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,31	14,93	5,95	3,64
X <sub>1.4</sub>	Sandang	0,22	12,30	6,38	3,31
X <sub>1.5</sub>	Kesehatan	2,28	7,36	4,28	1,57
X <sub>1.6</sub>	Pendidikan, rekreasi dan olah raga	1,57	8,42	4,58	2,02
X <sub>1.7</sub>	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-3,59	34,81	4,89	9,65
X <sub>2</sub>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>				
X <sub>2</sub>	Total	4,91	7,37	6,24	0,68
X <sub>2.1</sub>	Primer	0,99	8,79	5,00	2,35
X <sub>2.2</sub>	Sekunder	1,74	11,60	6,22	2,56
X <sub>2.3</sub>	Tersier	4,86	11,08	7,51	1,66
Y <sub>1</sub>	<b>Pengangguran</b>	3,00	7,59	4,68	1,31
Y <sub>2</sub>	<b>Kemiskinan</b>	5,36	11,37	7,99	2,18

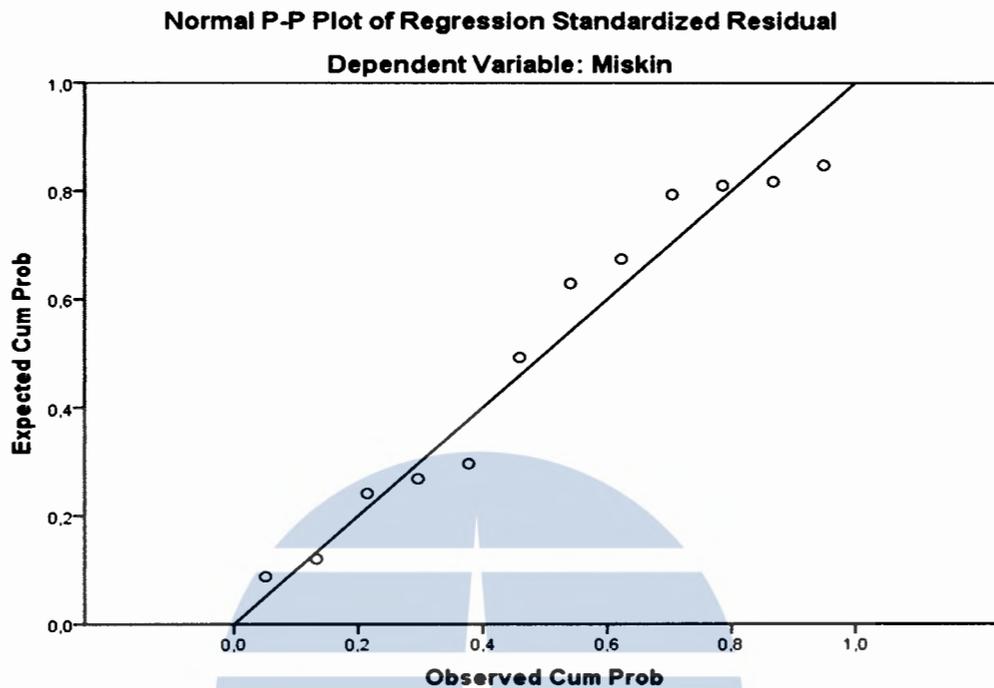
## 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji Normalitas, Multikolinieritas, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas.

### a. Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas dengan *normal probability plot* pada Gambar 4.8 menunjukkan plotting titik-titik mengikuti garis diagonalnya yang berarti data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Gambar 4.8. Uji Normalitas Data



#### b. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Bila nilai *VIF* lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan dalam model bebas dari penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas (Gujarati, 2003).

Perhitungan dengan SPSS 18.0 menunjukkan nilai *VIF* semua variabel bebas yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dalam penelitian ini lebih kecil dari 10. Variabel pertumbuhan ekonomi *VIF* 2,004, variabel inflasi *VIF* 1,025 dan variabel pengangguran 2,029. Sementara itu, perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua variabel bebas lebih dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 90 persen. Pertumbuhan ekonomi memiliki *tolerance* 0,499, inflasi dengan *tolerance* 0,975 dan

pengangguran 0,493. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 4.8. Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,798	5,487		1,057	,322		
	PEkonomi	-,729	,660	-,223	-1,103	,302	,499	2,004
	Inflasi	,235	,104	,327	2,264	,053	,975	1,025
	TPT	1,147	,368	,632	3,112	,014	,493	2,029

a. Dependent Variable: Miskin

### c. Uji Autokorelasi

Hasil penghitungan SPSS diperoleh dw sebesar 1,305 dan dari Tabel Durbin-Watson dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data  $(n) = 12$ ,  $k = 3$  ( $k$  adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai  $d_U$  sebesar 1,864 dan  $d_L$  sebesar 0,658. Deteksi autokorelasi positif diperoleh  $d_L < d < d_U$  yaitu  $0,658 < 1,305 < 1,864$  dan deteksi autokorelasi negatif diperoleh  $(4 - d) > d_U$  yaitu  $2,695 > 1,864$ . Sehingga disimpulkan bahwa data penelitian tidak ada autokorelasi.

Tabel 4.9. Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,915 <sup>a</sup>	,837	,776	,93687	1,305

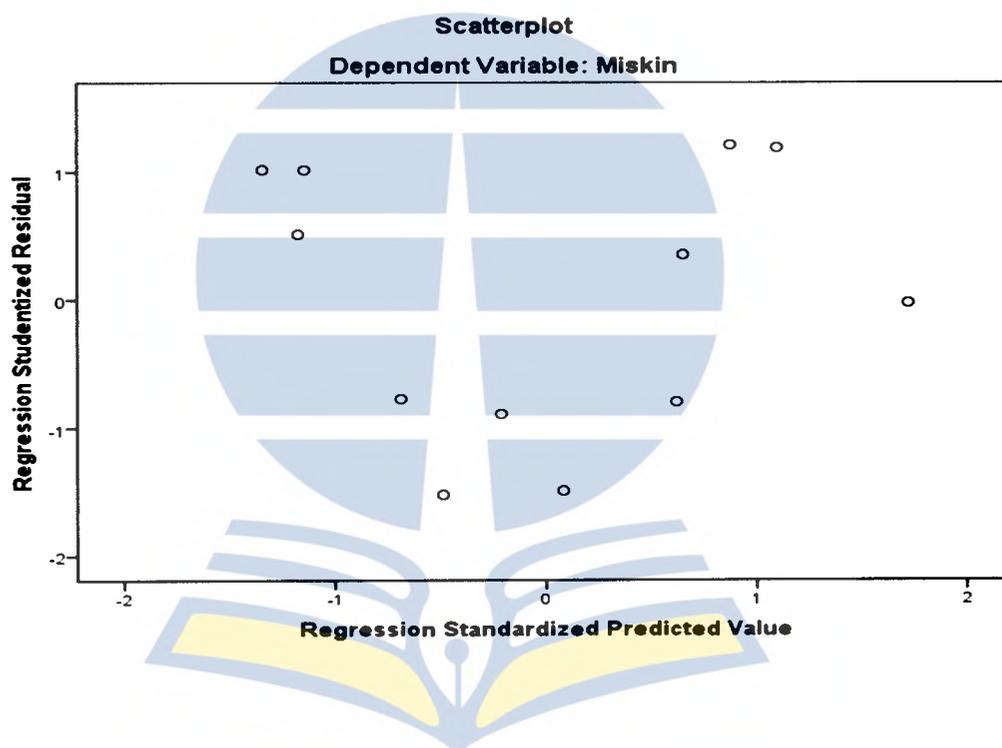
a. Predictors: (Constant), TPT, Inflasi, Pekonomi

b. Dependent Variable: Miskin

#### d. Uji Heterokedastisitas

Pengujian gejala Heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada grafik plot atau scatter antara "*Standardized Predicted Value (ZPRED)*" dengan "*Studentized Residual (SRESID)*" menunjukkan tidak ada pola tertentu yang jelas terbentuk. Hal ini menunjukkan tidak ada gejala heteroskedastisitas pada data penelitian.

Gambar 4.9. Uji Heterokedastisitas



### 3. Hasil Uji Statistik

Uji statistik dilakukan terhadap dua persamaan yaitu :

Persamaan 1 :  $Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_1$  yang menunjukkan bahwa inflasi ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran ( $Y_1$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ ) memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran ( $Y_1$ ).

Persamaan 2 :  $Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + \epsilon_2$  yang menunjukkan bahwa inflasi ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan ( $Y_2$ ), pertumbuhan ekonomi

( $X_2$ ) memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan ( $Y_2$ ) dan pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ).

**a. Uji F**

Uji statistik dengan program *Statistical Product and Service Solutions* atau SPSS 18.0 yang dilakukan terhadap persamaan 1 menghasilkan nilai F hitung sebesar 4,629 dengan nilai signifikansi 0,041. Sehingga persamaan 1 signifikan pada tingkat kepercayaan 5 persen. Hal ini berarti inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Tengah. Kedua variabel ini dapat menjelaskan 50,7 persen perubahan yang terjadi pada tingkat pengangguran di Kalimantan Tengah. Sedangkan 49,3 persen dijelaskan oleh variabel lain selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara uji statistik terhadap persamaan 2 menghasilkan F hitung sebesar 13,721 dengan signifikansi 0,002. Sehingga persamaan 2 juga signifikan pada tingkat kepercayaan 5 persen. Hal ini berarti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Ketiga variabel ini dapat menjelaskan 83,7 persen perubahan yang terjadi pada tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah sedangkan 16,3 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain selain inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Rangkuman hasil uji F dan koefisien determinasi masing-masing persamaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10. Hasil Uji F

Pengaruh Antar Variabel	Nilai F	Koefisien Determinan $R^2$	Signifikansi	Kesimpulan
(1)	(4)	(6)	(5)	(6)
Inflasi ( $X_1$ ) dan Pertumbuhan Ekonomi ( $X_2$ ) terhadap TPT ( $Y_1$ )	4,629	0,507	0,041	Persamaan 1 signifikan pada tingkat kepercayaan 5 persen
Inflasi ( $X_1$ ), Pertumbuhan Ekonomi ( $X_2$ ) dan Tingkat Pengangguran ( $Y_1$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan ( $Y_2$ )	13,721	0,837	0,002	Persamaan 1 signifikan pada tingkat kepercayaan 5 persen

Sumber : SPSS 18.0

**b. Uji t**

Uji t dilakukan untuk meneliti pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan di Kalimantan Tengah. Uji t dilakukan terhadap persamaan 1 dan persamaan 2 dan menghasilkan nilai sebagai berikut :

Tabel 4.11. Hasil Uji t

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien	Nilai t	Signifikansi	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Inflasi ( $X_1$ ) terhadap TPT ( $Y_1$ )	0,079	0,334	0,746	Tidak signifikan
Pertumbuhan Ekonomi ( $X_2$ ) terhadap TPT ( $Y_1$ )	-0,699	-2,967	0,016	Signifikan
Inflasi ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan ( $Y_2$ )	0,327	2,264	0,053	Tidak signifikan
Pertumbuhan Ekonomi ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan ( $Y_2$ )	-0,223	-1,103	0,302	Tidak signifikan
Tingkat Pengangguran Terbuka ( $Y_1$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan ( $Y_2$ )	0,632	3,112	0,014	Signifikan

Sumber : SPSS 18.0

Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah berpengaruh secara negatif terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Tengah dengan koefisien -0,699. Namun, inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran maupun tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Sementara tingkat pengangguran berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien 0,632. Pertumbuhan ekonomi juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah.

#### 4. Penghitungan Dampak Dengan Analisis Jalur

Analisis jalur digunakan untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung inflasi ( $X_1$ ), pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ ) terhadap tingkat pengangguran terbuka ( $Y_1$ ) dan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ). Hasil penghitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12.  
Analisis Jalur Variabel Inflasi ( $X_1$ ) dan Pertumbuhan Ekonomi ( $X_2$ ),  
terhadap Pengangguran ( $Y_1$ ) dan Dampaknya terhadap Kemiskinan ( $Y_2$ )

Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh		
		Langsung	Tidak Langsung	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Inflasi ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka ( $Y_1$ )	0,079	-	-	-
Pertumbuhan Ekonomi ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka ( $Y_1$ )	-0,699	-0,699	-	-0,699
Inflasi ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan ( $Y_2$ )	0,327	-	$0,079 \times 0,632 = 0,05$	0,050
Pertumbuhan Ekonomi ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan ( $Y_2$ )	-0,223	-0,223	$-0,699 \times 0,632 = -0,442$	-0,665
Tingkat Pengangguran Terbuka ( $Y_1$ ) terhadap Tingkat Kemiskinan ( $Y_2$ )	0,632	0,632	-	0,632

## 5. Disagregasi Variabel Bebas

Setelah mendapat hasil estimasi model pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan disagregasi data inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Disagregasi data inflasi dilakukan dengan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merinci inflasi menurut tujuh kelompok pengeluaran yaitu :

$X_{11}$  : Inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan

$X_{12}$  : Inflasi kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau

$X_{13}$  : Inflasi kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar

$X_{14}$  : Inflasi kelompok pengeluaran sandang

$X_{15}$  : Inflasi kelompok pengeluaran kesehatan

$X_{16}$  : Inflasi kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, dan olahraga

$X_{17}$  : Inflasi kelompok pengeluaran transport, komunikasi, dan jasa keuangan

Sedangkan disagregasi data pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengutip data BPS yang merinci pertumbuhan ekonomi menurut tiga kelompok sektor yaitu :

$X_{21}$  : Pertumbuhan ekonomi sektor primer

$X_{22}$  : Pertumbuhan ekonomi sektor sekunder

$X_{23}$  : Pertumbuhan ekonomi sektor tersier

Dengan melakukan disagregasi data inflasi dan data pertumbuhan ekonomi, maka persamaan menjadi :

$$Y_2 = X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} + X_{15} + X_{16} + X_{17} + X_{21} + X_{22} + X_{23} + Y_1$$

Uji statistik dengan program *Statistical Product and Service Solutions* atau SPSS 18.0 diperoleh koefisien determinasi atau  $R^2$  sebesar 0,997 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 5 persen. Sedangkan uji F yang dilakukan terhadap persamaan tersebut menghasilkan nilai F hitung sebesar 58,816 dengan nilai signifikansi 0,017. Sehingga persamaan signifikan pada tingkat kepercayaan 5 persen.

Sedangkan hasil uji t pada data inflasi yang didisagregasi menurut kelompok pengeluaran dan data pertumbuhan ekonomi yang didisagregasi menurut kelompok sektor diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.13. Hasil Uji t Data Didisagregasi

Variabel	Koefisien	Nilai t	Signifikansi	Hasil Pengujian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan	0,097	1,678	0,235	Tidak signifikan
Inflasi kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	0,405	5,194	0,035	Signifikan
Inflasi kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar	-0,670	-2,869	0,103	Tidak signifikan
Inflasi kelompok pengeluaran sandang	1,392	4,649	0,043	Signifikan
Inflasi kelompok pengeluaran kesehatan	-0,513	-5,982	0,027	Signifikan
Inflasi kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, dan olahraga	0,829	4,541	0,045	Signifikan
Inflasi kelompok pengeluaran transport, komunikasi, dan jasa keuangan	0,897	4,483	0,046	Signifikan
Pertumbuhan ekonomi sektor primer	1,312	3,966	0,058	Tidak signifikan
Pertumbuhan ekonomi sektor sekunder	1,349	3,593	0,069	Tidak signifikan
Pertumbuhan ekonomi sektor tersier	-0,194	-1,864	0,203	Tidak signifikan
Pengangguran	1,431	7,756	0,016	Signifikan

## C. Pembahasan

### 1. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka, namun pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Dengan demikian maka persamaan 1) menjadi  $Y_1 = -0,699X_2 + C_1$ . Hal ini berarti, peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen di Kalimantan Tengah akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Tengah sebesar 0,699 persen. Struktur ekonomi Kalimantan Tengah yang sebagian besar didukung oleh sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja menyebabkan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. Hal ini sejalan dengan penelitian Amir (2007) yang menyimpulkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen maka pengangguran akan menurun sekitar 0,46 persen.

. Tidak adanya pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Tengah disebabkan karena tingkat inflasi di Kalimantan Tengah relatif rendah dengan rata-rata 6,5 persen per tahun. Inflasi Kalimantan Tengah selama tahun 2003 sampai 2016 bernilai satu digit kecuali pada tahun 2005 sebesar 12,02 persen dan tahun 2008 sebesar 10,44 persen. Inflasi yang terjadi di Kalimantan Tengah ini termasuk dalam inflasi ringan atau *creeping inflation* yaitu inflasi dengan laju pertumbuhan yang berlangsung secara perlahan dan berada posisi satu digit atau dibawah 10 persen per tahun.

Penelitian yang dilakukan dengan data tahun 2003 – 2016 di Kalimantan Tengah juga menunjukkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi sebesar 50,7 persen dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada

tingkat pengangguran terbuka sedangkan sisanya sebesar 49,3 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model (ditunjukkan nilai  $R^2 = 0,507$ ).

## **2. Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan**

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Inflasi ringan yang terjadi di Kalimantan Tengah selama tahun 2003 sampai 2016 ternyata mampu menjaga tingkat daya beli masyarakat Kalimantan Tengah sehingga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian Imelia (2012) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian Imelia dilakukan pada tahun 2012 terhadap data tahun 1993-2007 di Jambi. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Amir (2007) yang menyimpulkan bahwa inflasi terbukti tidak ada pengaruh yang nyata terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah secara parsial juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kalimantan Tengah relatif tinggi dan didukung oleh tiga sektor ekonomi utama yaitu pertanian, industri dan pertambangan. Sektor industri dan pertambangan lebih banyak melibatkan perusahaan besar sehingga pertumbuhan sektor ini tidak terlalu berpengaruh terhadap penduduk miskin di Kalimantan Tengah yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian.

Meskipun secara langsung inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan namun secara tidak langsung inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah. Pengaruh tidak langsung inflasi terhadap kemiskinan di

Kalimantan Tengah sebesar  $0,079 \times 0,632 = 0,049928$  atau 0,05. Demikian juga pertumbuhan ekonomi. Meskipun secara langsung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan namun secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah. Pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah adalah sebesar  $(-0,699) \times 0,632 = 0,441768$  atau 0,44. Hal ini sejalan dengan penelitian Siti Amalia (2014) yang melakukan penelitian di Samarinda dan menyimpulkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan.

Sementara tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Persamaan strukturalnya menjadi  $Y_2 = 0,632Y_1 + \epsilon_2$ . Artinya penurunan tingkat pengangguran sebesar 1 persen di Kalimantan Tengah akan menurunkan tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah sebesar 0,632 persen. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Barika (2013) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan dengan koefisien 0,72 sehingga penurunan tingkat pengangguran akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,72 persen. Hasil ini juga sejalan dengan Munandar, Kurniawan dan Santoso (2007) yang melakukan penelitian berdasarkan estimasi perilaku siklikal (*cyclical behaviour*) kemiskinan dan pengangguran. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan akan turun jika pengangguran turun.

Meskipun secara parsial, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Kalimantan Tengah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah, namun secara bersama-sama ketiga variabel ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Inflasi, pertumbuhan

ekonomi dan pengangguran di Kalimantan Tengah memiliki kontribusi sebesar 83,7 persen dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah sedangkan sisanya sebesar 16,3 persen dijelaskan oleh variabel lain selain inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.

### **3. Pengaruh Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kelompok Sektor dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan**

Disagregasi data inflasi dan pertumbuhan dilakukan untuk meneliti lebih mendalam terkait pengaruh masing-masing kelompok pengeluaran inflasi dan kelompok sektor pertumbuhan ekonomi serta pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Dengan demikian diharapkan, kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah dapat dilakukan dengan lebih tepat.

Hasil pengujian pengaruh inflasi menurut kelompok pengeluaran, pertumbuhan ekonomi menurut kelompok sektor dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

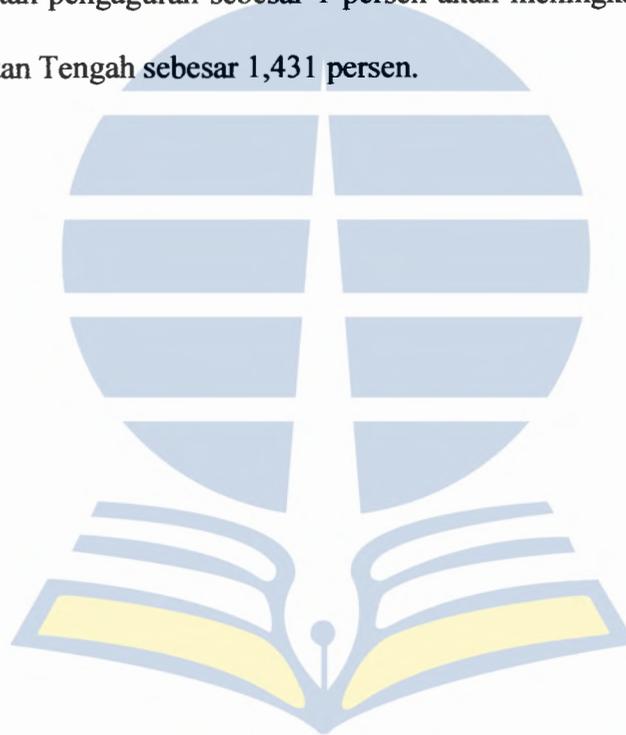
- a. Inflasi kelompok pengeluaran yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah adalah:
  - Kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah dengan koefisien 0,405. Artinya peningkatan inflasi yang terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1 persen maka akan meningkatkan kemiskinan di Kalimantan Tengah

sebesar 0,405 persen. Dengan demikian, inflasi pada kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau harus dikendalikan agar tidak mengganggu daya beli masyarakat Kalimantan Tengah atau bahkan meningkatnya kemiskinan.

- Kelompok pengeluaran sandang berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah dengan koefisien 1,392. Artinya peningkatan inflasi sebesar 1 persen pada kelompok sandang maka akan meningkatkan kemiskinan Kalimantan Tengah sebesar 1,392 persen. Koefisien inflasi kelompok ini paling besar dibandingkan kelompok pengeluaran yang lain sehingga inflasi kelompok ini harus diperhatikan agar tidak mengganggu konsumsi masyarakat dan meningkatkan kemiskinan.
- Kelompok pengeluaran kesehatan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah dengan koefisien -0,513. Artinya peningkatan inflasi kelompok kesehatan sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah sebesar 0,513 persen.
- Kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, dan olahraga berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah dengan koefisien 0,829. Artinya peningkatan 1 persen inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga akan meningkatkan kemiskinan Kalimantan Tengah sebesar 0,829 persen.
- Kelompok pengeluaran transport, komunikasi, dan jasa keuangan berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah

dengan koefisien 0,897. Artinya peningkatan inflasi sebesar 1 persen pada kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan di Kalimantan Tengah akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,897 persen.

- b. Pertumbuhan ekonomi baik kelompok sektor primer, sekunder dan tersier tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Sementara pengangguran yang terjadi di Kalimantan Tengah berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar 1,431 yang artinya peningkatan pengangguran sebesar 1 persen akan meningkatkan kemiskinan di Kalimantan Tengah sebesar 1,431 persen.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Inflasi tidak berpengaruh langsung baik terhadap tingkat pengangguran terbuka maupun tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Namun inflasi berpengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Tengah. Peningkatan sebesar 1 persen pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran sebesar 0,699 persen.
3. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah. Namun, secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
4. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh langsung terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah. Peningkatan sebesar 1 persen pengangguran akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,632 persen.
5. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Tengah. Kedua variabel ini dapat menjelaskan 50,7 persen perubahan yang terjadi pada tingkat pengangguran. Sementara inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah. Ketiga variabel ini memiliki kontribusi sebesar 83,7 persen dalam menjelaskan

perubahan yang terjadi pada variabel tingkat kemiskinan sedangkan sisanya sebesar 16,3 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa upaya perlu dilakukan untuk menekan tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah antara lain:

1. Pengendalian inflasi hendaknya terus dilakukan terutama pada empat kelompok pengeluaran yaitu kelompok sandang, kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.
2. Memacu pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja yaitu kelompok sektor tersier dan sektor primer sehingga kesempatan kerja lebih terbuka yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan di Kalimantan Tengah.
3. Pengangguran berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Untuk itu penyediaan lapangan kerja harus terus dilakukan. Dunia usaha dapat lebih ditingkatkan perannya dalam menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dalam wadah program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, I. (2009). *Statistik Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya*. Jakarta: Prenamedia Group
- Amalia, S. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan di Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, vol 05, No 02, 173-182
- Antoni. (2010). Kointegrasi antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Koperasi*, vol 12, No 02, 1-11
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Data Strategis BPS*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (2015). *Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Tengah 2010-2014*. Palangka Raya : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (2015). *Indeks Harga Konsumen Kota Palangka Raya dan Sampit Tahun 2014*. Palangka Raya : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (2015). *Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Tengah Agustus 2014*. Palangka Raya : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (2015). *Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2014*. Palangka Raya : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
- Barika. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, vol 05, No 01, 27-36
- Case, K.E and Fair, R.C. Penerjemah : Benyamin Molan (2004). *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta : PT Indeks
- Gujarati, D.N and Porter, D.C. Penerjemah : Raden Carlos Mangunsong (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat
- Hakim, Abdul. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Ekonisia
- Hermawan, Agus. (2012). *Komunikasi Pemasaran*. Jakarta : Erlangga
- Hersugondo. (2009). Peran Dunia Usaha dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Fokus Ekonomi*, vol 08, No 02, 97-105

- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, vol 01, No 01, 140-164
- Khalwaty, T. (2000). *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta : Gramedia
- Mankiw, N.G. Penerjemah Liza, F dan Imam, N. (2006). *Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Murni, A. (2013). *Ekonomika Makro*. Bandung : Refika Aditama
- Noor, H. Faizal. (2013). *Ekonomi Publik – Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*. Padang : Akademia Permata
- Noor, H. Faizal. (2013). *Ekonomi Manajerial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rahayu, Ani Sri. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Bumi Aksara
- Riduan dan Sunarto. (2007). *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta : Andi Offset
- Sukirno, Sudono. (2004). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Todaro, M.P. Penerjemah Munandar, H. (2000). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Bumi Aksara
- World Bank (ed). (2012). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta : Salemba Empat
- Yacoub, H. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*, vol 08, No 03, 176-185
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

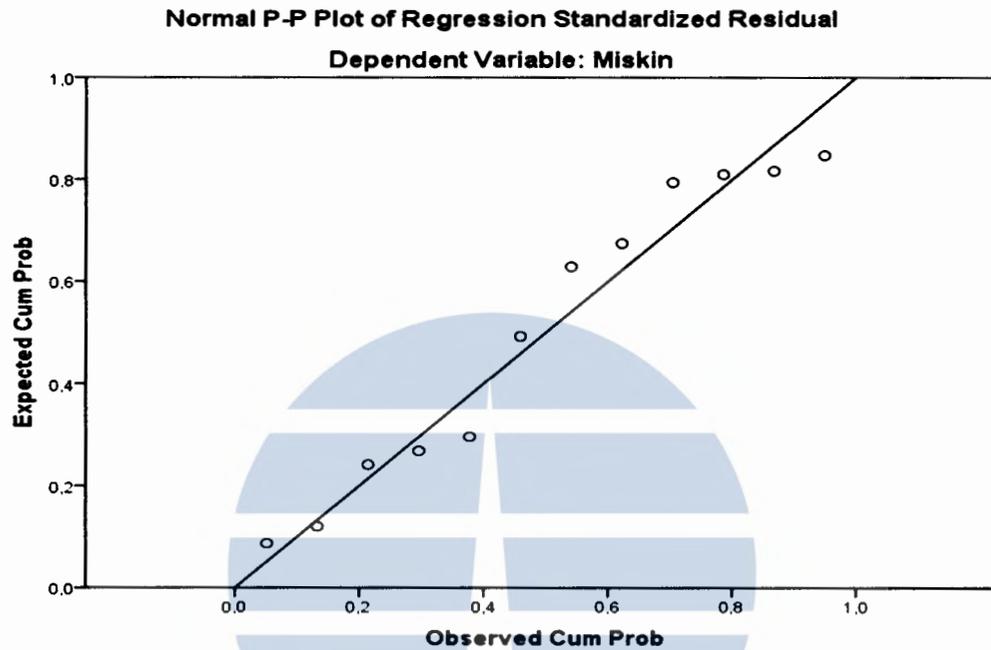
## Lampiran 1. Tabulasi Data Mentah

Variabel	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Inflasi</b>							
Umum	5,78	12,02	7,73	7,79	10,44	2,02	9,51
Bahan makanan	3,88	9,04	15,91	10,04	18,59	2,25	23,07
Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	8,27	6,57	5,21	9,45	12,31	7,37	6,09
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	5,30	14,93	3,77	8,26	7,60	0,31	3,93
Sandang	7,47	5,64	4,77	9,18	10,95	6,30	8,78
Kesehatan	2,28	4,75	3,38	3,56	4,40	2,70	3,00
Pendidikan, rekreasi dan olah raga	3,74	4,81	6,25	1,81	4,83	1,57	1,67
Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	8,21	34,81	0,43	0,63	3,30	-3,59	1,52
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>							
Total	5,56	5,90	5,84	6,06	6,17	5,57	6,50
Primer	2,51	7,70	7,30	3,16	0,99	4,96	4,89
Sekunder	6,72	3,49	1,74	8,92	7,37	6,16	5,81
Tersier	8,47	4,86	5,66	8,26	11,08	5,95	8,20
<b>Pengangguran</b>	5,59	4,85	6,68	5,11	4,59	4,62	4,14
<b>Kemiskinan</b>	10,44	10,73	11,00	9,38	8,71	7,02	6,77

Variabel	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Inflasi</b>					
Umum	4,55	5,85	6,79	7,07	4,74
Bahan makanan	2,05	7,70	7,41	7,00	8,93
Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	5,81	6,86	7,82	8,22	8,74
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	6,23	6,61	5,45	6,03	2,23
Sandang	12,30	4,53	0,22	2,81	5,60
Kesehatan	7,36	3,14	2,94	5,08	6,95
Pendidikan, rekreasi dan olah raga	4,70	7,43	4,90	5,57	3,98
Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	1,89	1,15	11,26	9,96	-2,63
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>					
Total	7,01	6,87	7,37	6,21	7,01
Primer	7,93	6,11	8,79	2,36	3,88
Sekunder	2,87	6,27	6,24	11,28	7,58
Tersier	8,74	8,07	6,55	7,27	9,86
<b>Pengangguran</b>	3,54	3,14	3,0	3,24	4,54
<b>Kemiskinan</b>	6,64	6,19	6,23	6,07	5,91

## Lampiran 2. Hasil Output SPSS

### 1. Uji Normalitas Data



### 2. Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,798	5,487		1,057	,322		
	PEkonomi	-,729	,660	-,223	-1,103	,302	,499	2,004
	Inflasi	,235	,104	,327	2,264	,053	,975	1,025
	TPT	1,147	,368	,632	3,112	,014	,493	2,029

a. Dependent Variable: Miskin

4. Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,915 <sup>a</sup>	,837	,776	,93687	1,305

a. Predictors: (Constant), TPT, Inflasi, Pekonomi

b. Dependent Variable: Miskin

Coefficient Correlations<sup>a</sup>

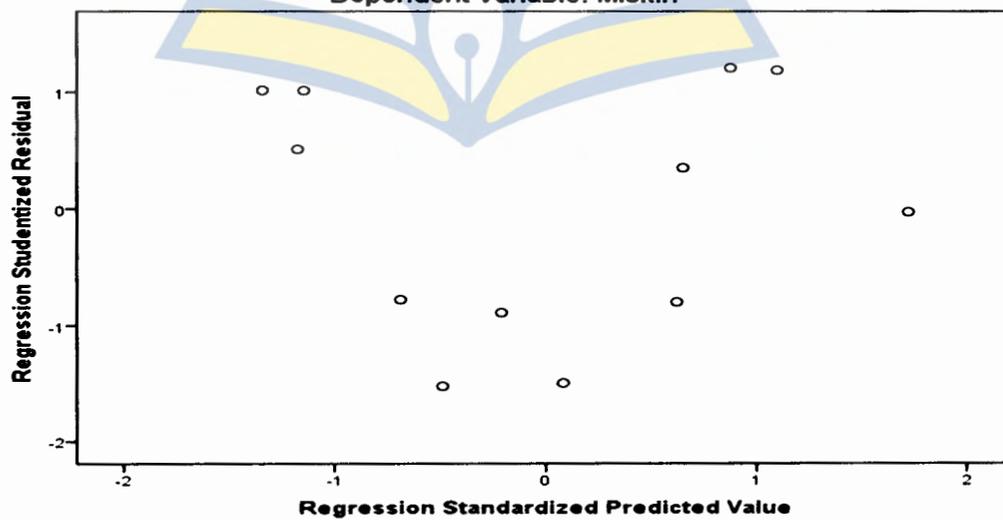
Model		TPT	Inflasi	Pekonomi	
1	Correlations	TPT	1,000	-,111	,703
		Inflasi	-,111	1,000	,002
		PEkonomi	,703	,002	1,000
Covariances	TPT	,136	-,004	,171	
	Inflasi	-,004	,011	,000	
	PEkonomi	,171	,000	,436	

a. Dependent Variable: Miskin

4. Uji Heterokedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Miskin



5. Model Summary Variabel Inflasi (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) terhadap Pengangguran (Y1)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,712 <sup>a</sup>	,507	,398	,84771	2,158

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Pekonomi

b. Dependent Variable: TPT

6. Tabel Anova Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,653	2	3,327	4,629	,041 <sup>a</sup>
	Residual	6,468	9	,719		
	Total	13,121	11			

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Pekonomi

b. Dependent Variable: TPT

7. Uji Parsial Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,191	2,852		4,274	,002		
	Pekonomi (E)	-1,260	,425	-,699	-2,967	,016	,987	1,013
	Inflasi (I)	,031	,093	,079	,334	,746	,987	1,013

a. Dependent Variable: TPT

8. Model Summary Variabel Inflasi (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2) dan Pengangguran (Y1) terhadap Kemiskinan (Y2)

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,915 <sup>a</sup>	,837	,776	,93687	1,305

a. Predictors: (Constant), TPT, Inflasi, Pekonomi

b. Dependent Variable: Miskin

9. Tabel Anova Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36,129	3	12,043	13,721	,002 <sup>a</sup>
	Residual	7,022	8	,878		
	Total	43,151	11			

a. Predictors: (Constant), TPT, Inflasi, Pekonomi

b. Dependent Variable: Miskin

10. Uji Parsial Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	d			Tolerance	VIF
				Coefficients				
B	Std. Error	Beta						
1	(Constant)	5,798	5,487		1,057	,322		
	Pekonomi (E)	-,729	,660	-,223	-1,103	,302	,499	2,004
	Inflasi (I)	,235	,104	,327	2,264	,053	,975	1,025
	TPT (P)	1,147	,368	,632	3,112	,014	,493	2,029

a. Dependent Variable: Miskin (M)

11. Data Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Didisagregasi

$$\text{Model 3 } Y_2 = aX_{11} + bX_{12} + cX_{13} + dX_{14} + eX_{15} + fX_{16} + gX_{17} + hX_{21} + iX_{22} + jX_{23} + kY_1 + e$$

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.998 <sup>a</sup>	.997	.980	.30900

a. Predictors: (Constant), X23, X13, X15, Y1, X16, X22, X11, X12, X17, X14, X21

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61.773	11	5.616	58.816	.017 <sup>a</sup>
	Residual	.191	2	.095		
	Total	61.964	13			

a. Predictors: (Constant), X23, X13, X15, Y1, X16, X22, X11, X12, X17, X14, X21

b. Dependent Variable: Y2

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-22.768	6.135		-3.711	.066
	Y1	2.379	.307	1.431	7.756	.016
	X11	.031	.019	.097	1.678	.235
	X12	.362	.070	.405	5.194	.035
	X13	-.402	.140	-.670	-2.869	.103
	X14	.919	.198	1.392	4.649	.043
	X15	-.715	.120	-.513	-5.982	.027
	X16	.895	.197	.829	4.541	.045
	X17	.203	.045	.897	4.483	.046
	X21	1.218	.307	1.312	3.966	.058
	X22	1.149	.320	1.349	3.593	.069
	X23	-.256	.137	-.194	-1.864	.203

a. Dependent Variable: Y2

